

TRIWULAN 1 2025

LAPORAN

KINERJA

BALAI POM DI BOGOR



KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2025 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bogor mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2025 merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2025 yang disusun berdasarkan rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada Tahun 2025



Laporan Kinerja disusun secara periodik dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Balai POM di Bogor dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam Laporan Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bogor Interim Triwulan I Tahun 2025 tertuang perjanjian kinerja dan indikator yang mengacu pada Renstra Balai POM di Bogor Tahun 2025-2029, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja triwulan I tahun 2025 serta membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja terhadap target triwulan I tahun 2025, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2025 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bogor pada periode selanjutnya.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja

Bogor, 25 April 2025
Kepala Balai POM di Bogor,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

 Jeffeta Pradeko Putra, S.Farm., M.Si 

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR ISI 3

DAFTAR TABEL 4

DAFTAR GAMBAR 6

IKHTISAR EKSEKUTIF 7

BAB 1 PENDAHULUAN..... 9

1.1 LATAR BELAKANG 9

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI 9

1.3 STRUKTUR ORGANISASI 11

1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI 12

1.5 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS 12

1.5.1 INTERNAL 12

1.5.2 EKSTERNAL 14

1.5 ISU STRATEGIS 15

ISU STRATEGIS YANG MEMPENGARUHI KINERJA BALAI POM DI BOGOR DIKAJI MELALUI RENSTRA 2025-2029 BALAI POM DI BOGOR DIBAGI MENJADI 2 YAITU, INTERNAL DAN EKSTERNAL:..... 15

1.5.1 INTERNAL..... 15

1.5.2 EKSTERNAL..... 16

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA..... 22

2.1 URAIAN SINGKAT RENCANA STRATEGIS 22

2.1.1 VISI 23

2.1.2 MISI..... 23

2.2 SASARAN KEGIATAN 24

2.3 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 27

2.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025..... 29

2.5 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA BOGOR TAHUN 2025..... 31

2.6 KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR 33

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA 35

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 35

3.1.1 SASARAN KEGIATAN KE-1: TERWUJUDNYA OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT DI MASING –MASING WILAYAH KERJA UPT 38

3.1.2 SASARAN KEGIATAN KE-2: MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN SARANA OBAT DAN MAKANAN SERTA PELAYANAN PUBLIK DI MASING MASING WILAYAH KERJA UPT..... 62

3.1.3 SASARAN KEGIATAN KE-3: MENGUATNYA LAB PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN DI WILAYAH KERJA UPT	65
3.1.4 SASARAN KEGIATAN KE-4: MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PRODUK DAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN DI MASING–MASING WILAYAH KERJA UPT	67
3.1.5 SASARAN KEGIATAN KE-5: MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENINDAKAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN DI MASING–MASING WILAYAH KERJA UPT	78
3.1.6 SASARAN KEGIATAN KE-6: TERWUJUDNYA TATAKELOLA PEMERINTAHAN UPT YANG OPTIMAL	83
3.1.7 SASARAN KEGIATAN KE-7: TERWUJUDNYA SDM UPT YANG BERKINERJA OPTIMAL	86
3.1.8 SASARAN KEGIATAN KE-8 : MENGUATNYA LABORATORIUM, PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	89
3.1.9 SASARAN KEGIATAN KE-9 : TERKELOLANYA KEUANGAN UPT SECARA AKUNTABEL	90
3.2 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA.....	99
3.3 REALISASI ANGGARAN	102
3.3.1 REALISASI ANGGARAN TRIWULAN I TAHUN 2025.....	102
3.3.2 REALISASI KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN REALISASI ANGGARAN	103
3.3.3 REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN	106
3.3.4 EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA PER SASARAN.....	107
BAB 4 PENUTUP	112
4.1 KESIMPULAN	112
4.2 SARAN.....	2
LAMPIRAN	4

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di Bogor Tahun 2025.....	27
Tabel 2 Perjanjian Kinerja Balai POM di Bogor Tahun 2025.....	29
Tabel 3 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Bogor Tahun 2025.....	31
Tabel 4 PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN PERSENTASE CAPAIAN PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TRIWULAN I TAHUN 2025	36
Tabel 5 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “PERSENTASE SAMPEL SEDIAAN FARMASI BERISIKO YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN” TRIWULAN I TAHUN 2025	40
Tabel 6 Perbandingan Realisasi “Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan” triwulan I tahun 2025.....	40
Tabel 7 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya TW 1	41
Tabel 8 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO” TW I TAHUN 2025	42
Tabel 9 Perbandingan Realisasi “Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO” triwulan I tahun 2025	43
Tabel 10 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya TW 1	43
Tabel 11 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan TRIWULAN I TAHUN 2025.....	44
Tabel 11 Perbandingan Realisasi “Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan” triwulan I tahun 2025.....	45
Tabel 13 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya TW 1	45
Tabel 12 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar TRIWULAN I TAHUN 2025	46
Tabel 13 Perbandingan Realisasi “Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan” triwulan I tahun 2025.....	47
Tabel 16 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya TW 1	47
Tabel 14 Perbandingan Realisasi “Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan” triwulan I tahun 2025	48

Tabel 15 Perbandingan Realisasi “Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan” triwulan I tahun 2025	49
Tabel 19 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya TW 1	49
Tabel 16 Perbandingan Realisasi “Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder” triwulan I tahun 2025	50
Tabel 17 Perbandingan Realisasi “Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder” triwulan I tahun 2025	51
Tabel 22 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya TW 1	51
Tabel 18 Perbandingan Realisasi “Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” triwulan I tahun 2025.....	52
Tabel 19 Perbandingan Realisasi “Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” triwulan I tahun 2025.....	53
Tabel 25 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya TW 1	53
Tabel 26 Perbandingan Realisasi “Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” triwulan I tahun 2025.....	54
Tabel 21 Perbandingan Realisasi “Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” triwulan I tahun 2025.....	55
Tabel 28 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya TW 1	55
Tabel 22 Perbandingan Realisasi “Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” triwulan I tahun 2025	56
Tabel 23 Perbandingan Realisasi “Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” triwulan I tahun 2025	57
Tabel 31 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya TW 1	58
Tabel 24 Perbandingan Realisasi “Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” triwulan I tahun 2025.....	58
Tabel 25 Perbandingan Realisasi “Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” triwulan I tahun 2025	59
Tabel 34 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya TW 1	60
Tabel 26 Perbandingan Realisasi “Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan” triwulan I tahun 2025.....	60
Tabel 27 Perbandingan Realisasi “Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” triwulan I tahun 2025	61
Tabel 37 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya TW 1	62
Tabel 28 CAPAIAN KINERJA SARAN KEGIATAN KE-2 TRIWULAN I TAHUN 2025	62
Tabel 29 Perbandingan Realisasi “Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” triwulan I tahun 2025	63
Tabel 30 Perbandingan Realisasi “Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” triwulan I tahun 2025	64
Tabel 41 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya TW 1	64
Tabel 31 CAPAIAN KINERJA SARAN KEGIATAN KE-3 TRIWULAN I TAHUN 2025	65
Tabel 32 Perbandingan Realisasi “Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium” triwulan I tahun 2025	66
Tabel 44 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya TW 1	66
Tabel 33 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-4 TRIWULAN I TAHUN 2025.....	67
Tabel 34 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT” TRIWULAN I TAHUN 2025	68
Tabel 35 Perbandingan Realisasi “Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT” triwulan I tahun 2025.....	69
Tabel 48 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya TW 1	70
Tabel 36 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan” TRIWULAN I TAHUN 2025	72
Tabel 37 Perbandingan Realisasi “Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan” triwulan I tahun 2025.....	72
Tabel 51 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya TW 1	73
Tabel 38 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Jumlah Desa Pangan Aman” TRIWULAN I TAHUN 2025.....	74
Tabel 39 Perbandingan Realisasi “Jumlah Desa Pangan Aman” triwulan I tahun 2025	74
Tabel 54 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya TW 1	75
Tabel 40 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas” TRIWULAN I TAHUN 2025	76
Tabel 41 Perbandingan Realisasi “Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas” triwulan I tahun 2025	77
Tabel 57 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya TW 1	77

Tabel 42 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-5 TRIWULAN I TAHUN 2025.....78

Tabel 59 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan” TRIWULAN I Tahun 2025 ...81

Tabel 44 Perbandingan Realisasi “Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan” triwulan I tahun 2025 81

Tabel 61 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya TW 1 82

Tabel 45 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-6 TRIWULAN I TAHUN 2025.....83

Tabel 46 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT” Triwulan I Tahun 2025 84

Tabel 47 Perbandingan Realisasi “Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT” triwulan I tahun 2025 85

Tabel 65 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya TW 1 85

Tabel 48 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-7 Triwulan I Tahun 2025 86

Tabel 49 Perbandingan Realisasi “Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT” triwulan I tahun 2025 87

Tabel 68 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya TW 1 88

Tabel 50 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-8 Triwulan I Tahun 2025 89

Tabel 51 Perbandingan Realisasi “Indeks Pelayanan Publik UPT” triwulan I tahun 2025 90

Tabel 52 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-9 TRIWULAN I TAHUN 2025.....90

Tabel 53 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM” TRIWULAN I TAHUN 2025 ...91

Tabel 54 Perbandingan Realisasi “Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM” triwulan I tahun 2025.....92

Tabel 55 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Nilai AKIP UPT” TRIWULAN I TAHUN 2025 94

Tabel 56 Perbandingan Realisasi “Nilai AKIP UPT” triwulan I tahun 2025 94

Tabel 57 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM” TRIWULAN I TAHUN 2025 ..95

Tabel 58 Perbandingan Realisasi “Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM” triwulan I tahun 2025 96

Tabel 59 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM” TRIWULAN I TAHUN 2025 98

Tabel 60 Perbandingan Realisasi “Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM” triwulan I tahun 2025 98

Tabel 61 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan I Tahun 2025 99

Tabel 62 RINCIAN REALISASI ANGGARAN BALAI POM DI BOGOR TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025 102

Tabel 63 Rincian Realisasi kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran triwulan I 2025.....103

Tabel 64 Realiasi anggaran per Kegiatan per triwulan I 2025.....106

Tabel 65 Tingkat Efisiensi dan efektivitas atas penggunaan sumber daya dalam.....108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Balai POM di Bogor Tahun 2025 11

Gambar 2 Data Pegawai Balai POM berdasarkan pendidikan tahun 2025 13

Gambar 3 Misi Balai POM di Bogor.....24

Gambar 4 Rincian Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Triwulan I Tahun 2025 103

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Balai POM di Bogor Interim Triwulan I Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis pada tahun 2025 mengacu pada Renstra Balai POM di Bogor tahun 2025-2029 yang terdiri dari 10 sasaran strategis dengan 26 indikator kinerja utama. Dari 10 sasaran strategis, diperoleh 1 sasaran strategis memperoleh capaian “**Baik**”, 1 sasaran strategis memperoleh capaian “**Cukup**”, 2 sasaran strategis memperoleh capaian “**Kurang**”, 4 sasaran strategis dengan capaian “**Tidak Dapat Disimpulkan**”, dan 2 sasaran strategis baru dilakukan penilaian di akhir tahun.

Pernyataan pencapaian tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Pada triwulan I tahun 2025 Balai POM di Bogor berhasil Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Bogor dengan NPS sebesar 158,21% dengan kriteria “**Tidak Dapat Disimpulkan**”.
2. Pada triwulan I tahun 2025 Balai POM di Bogor berhasil Meningkatkan Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi di wilayah kerja Balai POM di Bogor dengan NPS sebesar 133,33% dengan kriteria “**Tidak Dapat Disimpulkan**”.
3. Pada triwulan I tahun 2025 Balai POM di Bogor berhasil Mewujudkan Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Bogor dengan NPS sebesar 197,50 % dengan kriteria “**Tidak Dapat Disimpulkan**”.
4. Pada triwulan I tahun 2025 Balai POM di Bogor belum berhasil Meningkatkan Efektivitas KIE di wilayah kerja Balai POM di Bogor dengan NPS sebesar 60,58% dengan kriteria “**Kurang**”
5. Pada triwulan I tahun 2025 Balai POM di Bogor belum berhasil Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu dengan NPS sebesar 58,35% dengan kriteria “**Kurang**”.
6. Pada triwulan I tahun 2025 Balai POM di Bogor berhasil mewujudkan Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Bogor dengan NPS sebesar 191,67% dengan kriteria “**Tidak Dapat Disimpulkan**”.
7. Pada triwulan I tahun 2025 Balai POM di Bogor berhasil mewujudkan Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Bogor dengan NPS sebesar 100% dengan kriteria “**Baik**”.
8. Indikator Kinerja Layanan Publik UPT yang prima baru dilakukan penilaian di akhir tahun.
9. Indikator Kinerja Terwujudnya tata kelola pemerintahan Unit Organisasi yang optimal baru dilakukan penilaian di akhir tahun.
10. Indikator Kinerja Meningkatnya kepuasan masyarakat dan pelaku usaha pengguna layanan

atas kinerja penyelenggaraan pelayanan publik BPOM baru dilakukan penilaian di akhir tahun.

Persentase capaian target sasaran strategis Balai POM di Bogor pada triwulan I tahun 2025 antara 58,35% sampai dengan 197,50%. Capaian sasaran strategis terendah pada indikator “Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu”. Sedangkan capaian sasaran strategis tertinggi pada indikator “Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT” sebesar 197,50%.

Pada tahun 2025, anggaran Balai POM di Bogor sebesar Rp.9,854,603,000 (Sembilan Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tiga Rupiah), dengan realisasi sebesar Rp. 1,641,520,442 (Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) sehingga persentase capaian realisasi sebesar 16,66%.

Hasil evaluasi kinerja ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi Balai POM di Bogor untuk dapat memperlihatkan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya

Bogor, 25 April 2025

Kepala Balai POM di Bogor



 **Jeffeta Pradeko Putra, S.Farm., M.Si** 

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Interim Balai POM di Bogor Triwulan I Tahun 2025 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Triwulan I Tahun 2025 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi organisasi. Laporan Kinerja Interim ini juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja seluruh unit organisasi dan untuk mendapatkan masukan dari stakeholders untuk perbaikan kinerja Balai POM di Bogor. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pengawasan Obat dan Makanan dalam 5 (lima) tahun ke ini menghadapi berbagai tantangan, antara lain : 1) aspek kesehatan-menjamin Produk Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu; 2) aspek sosial-meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas produk Obat dan Makanan yang beredar; 3) aspek ekonomi-mendorong daya saing industry Obat dan Makanan dengan semakin mudahnya perizinan dan sertifikasi Obat dan Makanan dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan dan mutu produk, termasuk jaminan produk halal, dukungan pengembangan Obat dan Makanan baru, serta mendorong ketersediaan bahan baku dalam negeri melalui riset, meniadakan penyelundupan dan peredaran produk ilegal dan palsu, serta memperluas penggunaan teknologi dalam pengawasan Obat dan Makanan; 4) aspek keamanan nasional meningkatkan penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran/kejahatan Obat dan Makanan yang merupakan kejahatan kemanusiaan, termasuk bioterorisme; dan 5) aspek teknologi-meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan berbasis teknologi informai untuk menghadapi tren peredaran Obat dan Makanan daring di era Revolusi Industri 4.0

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Badan POM terbentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berdasarkan dari peraturan tersebut dan upaya efektivitas pengawasan obat dan makanan maka dibuatlah Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Peraturan tersebut merupakan dasar dari terbentuknya Unit Pelayanan Teknis (UPT) di lingkungan BPOM yang tersebar di wilayah Indonesia.

UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. UPT terdiri atas: a. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai Besar POM; b. Balai Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai POM; dan c. Loka Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Loka POM.

Payung hukum pembentukan Balai POM di Bogor berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Balai POM di Bogor memiliki tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan Kota Depok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Balai POM beralamat Jl. Raya Bogor No. 27 B, Nanggewer, Cibinong, Kab. Bogor dengan wilayah kerja Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok. Selain itu Balai POM di Bogor juga memiliki Laboratorium di Gedung II yang beralamat di Jl. KSR Dadi Kusmayadi No 40 Cibinong Bogor.

KEDUDUKAN

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bogor merupakan UPT BPOM yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, secara teknis dibina oleh Deputy dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. UPT BPOM dipimpin oleh Kepala.

TUGAS

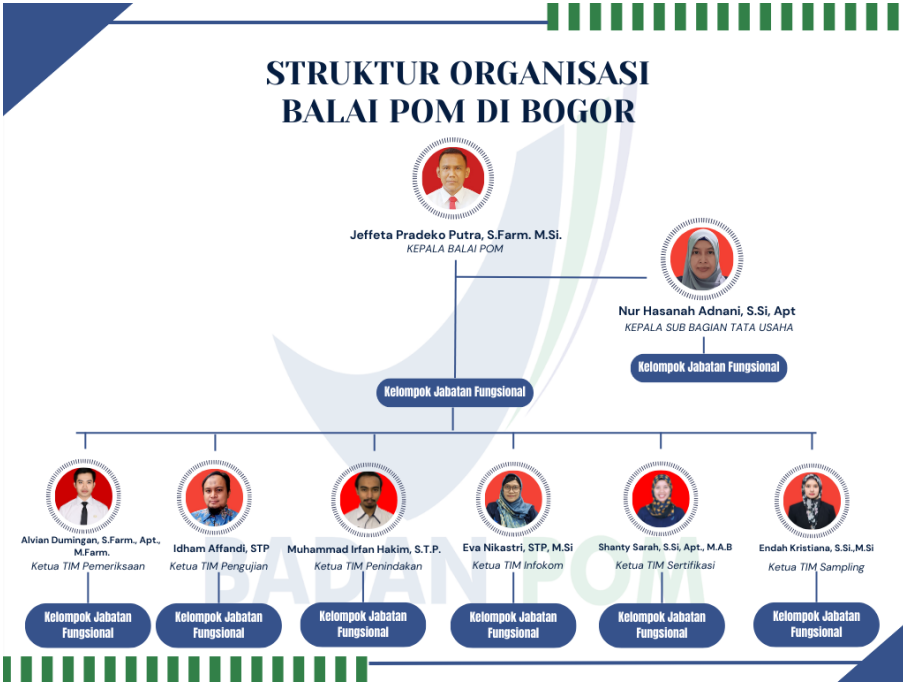
Berdasarkan Pasal 3 Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 Balai POM di Bogor sebagai UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai POM di Bogor menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 1 Struktur Organisasi Balai POM di Bogor Tahun 2025

Struktur Organisasi Balai POM di Bogor berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 adalah Kepala Balai POM langsung membawahi Sub Bagian Tata Usaha, Ketua Tim Kerja dan kelompok jabatan fungsional. Kelompok jabatan fungsional tersebut masing-masing

melaksanakan fungsi Informasi dan Komunikasi, Pemeriksaan dan Sertifikasi, Pengujian, Penindakan dan Tata Usaha.

1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sasaran strategis Balai POM di Bogor disusun berdasarkan visi, misi dan sasaran strategis yang sesuai Rencana Strategis Tahun 2025-2029 (Renstra Tahun 2025-2029) Balai POM di Bogor. Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 tersebut diharapkan Balai POM di Bogor akan dapat mencapai sasaran strategis sebagai berikut:

- a. Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
- b. Menguatnya kapasitas laboratorium BPOM dalam mendukung pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
- c. Meningkatnya kesadaran masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang bermutu
- d. Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industry dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
- e. Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
- f. Layanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
- g. Terwujudnya organisasi dan tata kelola BPOM yang berintegritas dan adaptif

Terkait dengan peta strategi tersebut, Balai POM di Bogor sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM mempunyai peran strategis dalam pencapaian outcome tersebut di atas, utamanya dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerjanya yaitu Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan Kota Depok. Mengingat luasnya wilayah kerja dengan SDM yang masih kurang berdasarkan analisis beban kerja, Balai POM di Bogor berusaha melaksanakan fungsi dengan maksimal.

1.5 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

1.5.1 INTERNAL

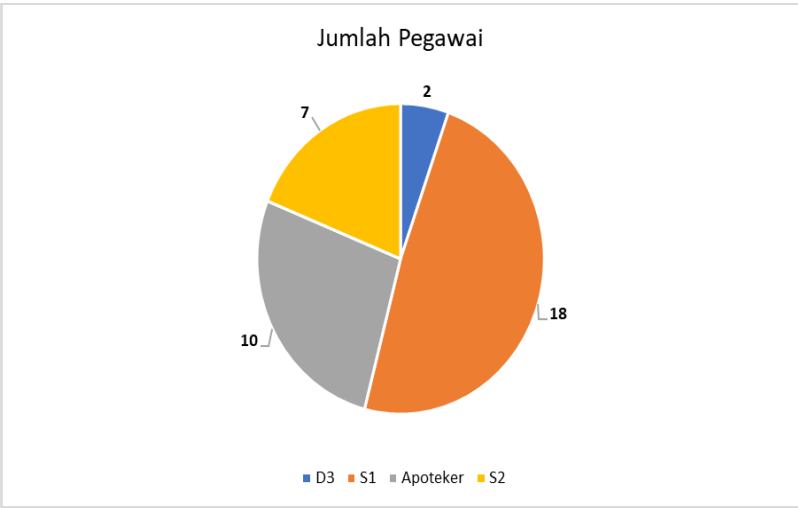
a. Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Pada tahun 2023 dengan adanya kebutuhan organisasi dalam penguatan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, maka telah dinaikkan level Loka POM di Kabupaten Bogor menjadi Balai POM di Bogor berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan

diperkuatnya kelembagaan Balai POM di Bogor dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maka semakin banyak tantangan yang dihadapi dalam melakukan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Koordinasi dan kolaborasi dengan internal Badan POM maupun dengan pentahelix semakin diperlukan.

b. Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM yang dimiliki Balai POM di Bogor adalah sebanyak 37 Pegawai terdiri dari 34 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 3 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dimana jumlah tersebut berdasarkan analisis beban kerja (ABK) masih belum tercukupi. Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan bisa dilihat pada gambar 2 dibawah ini.



Gambar 2 Data Pegawai Balai POM berdasarkan pendidikan tahun 2025

c. Anggaran

Anggaran Balai POM di Bogor bersumber dari APBN sesuai DIPA Nomor: SP DIPA-063.01.2.672846/2025 yang diterbitkan pada tanggal 02 Desember 2024 sebesar Rp. 9.774.448.000 (Sembilan Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah).

d. Sarana Prasana

Penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang kinerja merupakan kegiatan penunjang/pendukung, namun sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan tupoksi, kebutuhan pegawai, serta kelancaran operasional Balai POM di Bogor dalam upaya untuk meningkatkan kinerja dan peningkatan pelayanan. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai akan sangat mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja dan berdampak.

Balai POM di Bogor terus mempersiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas. Saat ini Balai POM di Bogor belum memiliki gedung kantor yang definitif/tetap , sehingga saat ini masih menyewa gedung untuk kantor

operasional laboratorium dan pelayanan publik.

Perkembangan teknologi informasi menuntut tersedianya alat pengolah data dan komunikasi yang semakin memadai. Sebagai sarana penunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan dan membantu mendorong peningkatan kinerja pegawai, Balai POM di Bogor masih membutuhkan pemenuhan alat pengolah data dan komunikasi.

1.5.2 EKSTERNAL

A. Kondisi Geografis dan Demografis

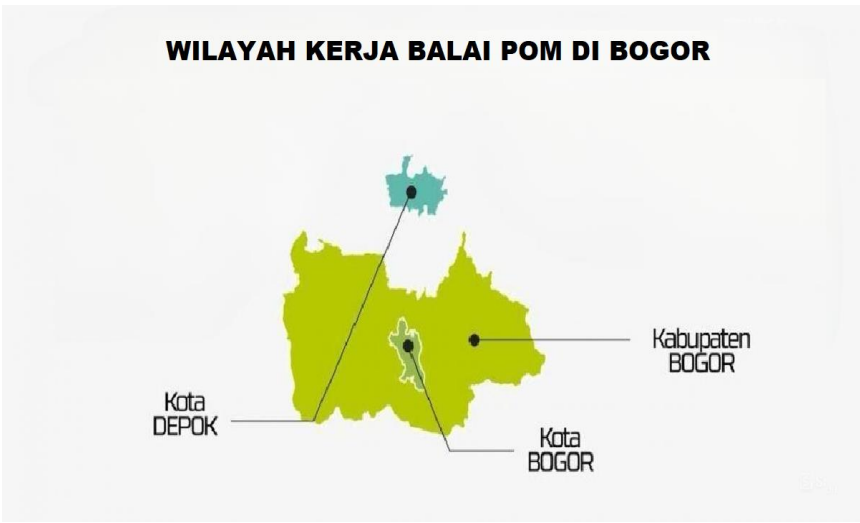
Berdasarkan PerBPOM Nomor 19 Tahun 2023, wilayah kerja Balai POM di Bogor meliputi 3 wilayah Kabupaten dan Kota yaitu Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan Kota Depok.

- Kabupaten Bogor
Luas : 2.986,20 km² (sumber : BPS Kabupaten Bogor Tahun 2021)

Penduduk : 5.489.536 (sumber : BPS Jawa Barat Tahun 2021)
- Kota Bogor
Luas : 118.50 km² (sumber : BPS Kota Bogor Tahun 2017)

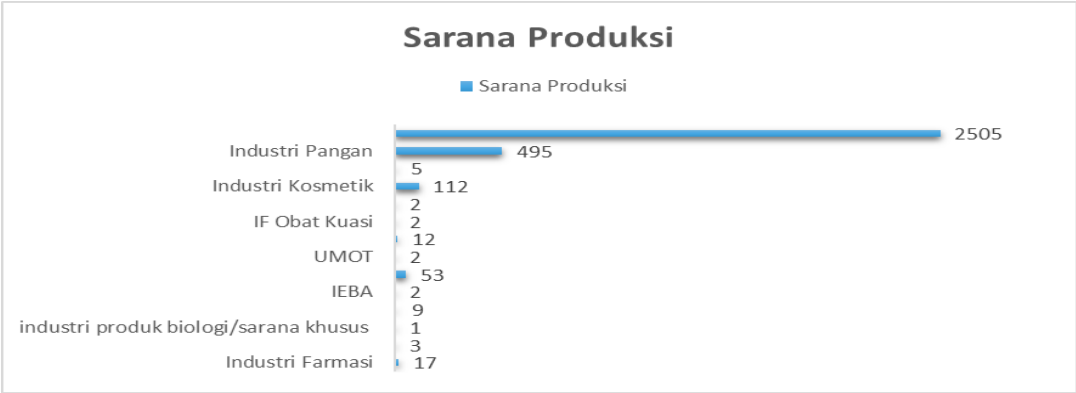
Penduduk : 1.052.359 (sumber : BPS Jawa Barat Tahun 2021)
- Kota Depok
Luas : 200,29 km² (sumber : BPS Kota Depok Tahun 2018)

Penduduk : 2.056.335 (sumber : BPS Jawa Barat Tahun 2020)

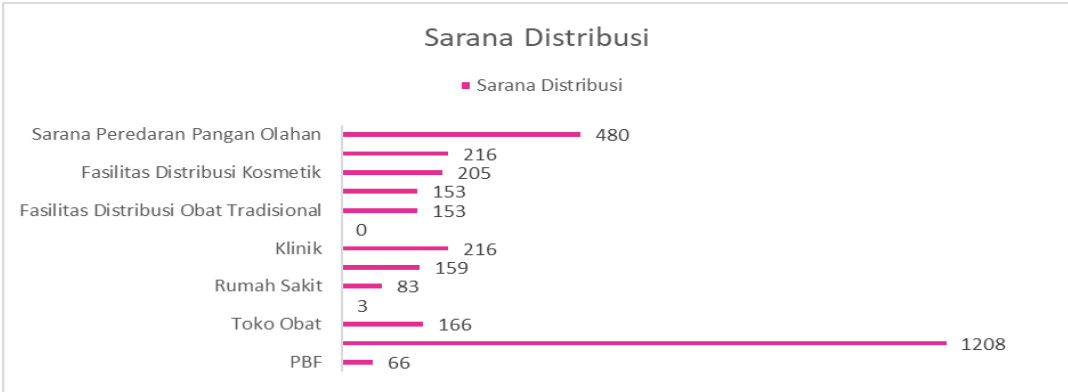


Gambar 3 Wilayah Kerja Balai POM di Bogor

B. Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi



Gambar 4 Jumlah Sarana Produksi di wilayah kerja Balai POM di Bogor



Gambar 5 Jumlah Sarana Distribusi di wilayah kerja Balai POM di Bogor

1.5 ISU STRATEGIS

Isu Strategis yang mempengaruhi kinerja Balai POM di Bogor dikaji melalui Renstra 2025-2029 Balai POM di Bogor dibagi menjadi 2 yaitu, internal dan eksternal:

1.5.1 Internal

A. Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Pada tahun 2023 dengan adanya kebutuhan organisasi dalam penguatan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, maka telah dinaikkan level Loka POM di Kabupaten Bogor menjadi Balai POM di Bogor berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan diperkuatnya kelembagaan Balai POM di Bogor dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maka semakin banyak tantangan yang dihadapi dalam melakukan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Koordinasi dan kolaborasi dengan internal Badan POM maupun dengan pentahelix semakin diperlukan

B. Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM yang dimiliki Balai POM di Bogor adalah sebanyak 37 Pegawai terdiri dari 34 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 3 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Dimana jumlah tersebut berdasarkan analisis beban kerja (ABK) masih belum tercukupi.

C. Sarana Prasarana

Penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang kinerja merupakan kegiatan penunjang/pendukung, namun sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan tupoksi, kebutuhan pegawai, serta kelancaran operasional Balai POM di Bogor dalam upaya untuk meningkatkan kinerja dan peningkatan pelayanan. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai akan sangat mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja dan berdampak.

Balai POM di Bogor terus mempersiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas. Saat ini Balai POM di Bogor belum memiliki gedung kantor yang definitif/tetap, sehingga saat ini masih menyewa gedung untuk kantor operasional laboratorium dan pelayanan publik.

Perkembangan teknologi informasi menuntut tersedianya alat pengolah data dan komunikasi yang semakin memadai. Sebagai sarana penunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan dan membantu mendorong peningkatan kinerja pegawai, Balai POM di Bogor masih membutuhkan pemenuhan alat pengolah data dan komunikasi.

1.5.2 Eksternal

A. Perkembangan Teknologi Farmasi Dan Inovasi Produk Obat

Perkembangan teknologi farmasi dan inovasi produk obat dan makanan yang menuntut inovasi dan intensifikasi pengawasan. Green Research and Opportunities With BPOM (GROW BPOM) merupakan salah satu inovasi yang dihasilkan oleh Balai POM di Bogor untuk memfasilitasi pemanfaatan produk inovasi oleh pelaku usaha Obat dan Makanan, sehingga mampu meningkatkan daya saing UMKM dan menghasilkan produk yang aman dan bermutu.

B. Tingginya minat masyarakat pada transaksi online

Perkembangan teknologi dan revolusi industri 4.0 tidak dapat dihindari, teknologi digital telah menyebar di seluruh sektor. Sebagian besar perusahaan menggunakan teknologi untuk melakukan pemasaran produknya, hal ini menjadi tantangan Badan POM sebagai institusi pengawas. Teknologi digital menyebabkan munculnya otomasi/teknologi baru yang menyebabkan perubahan yang luar biasa di semua disiplin ilmu. Untuk itu Balai POM di Bogor perlu melakukan penguatan untuk mencegah tindak kejahatan dan peredaran Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan yang dapat dilakukan melalui sarana online.

C. Perubahan program pemerintah dan fokus program ketahanan pangan sebagai program prioritas pemerintah yang membutuhkan dukungan Badan POM

D. Pesatnya pertumbuhan UMKM

Pesatnya pertumbuhan UMKM Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan. Balai POM di Bogor memiliki inovasi PINTAR UMKM, yaitu Pendampingan Seputar UMKM di Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan Kota Depok., untuk melakukan jemput bola izin UMKM Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan. Melalui kegiatan desk registrasi pangan olahan telah berhasil diterbitkan 45 Nomor Izin Edar (NIE), 12 akun E-Registrasi Perusahaan, dan 5 Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dalam waktu 1 (satu) hari.

E. Penyesuaian program pemerintah daerah

Penyesuaian program pemerintah daerah yang membutuhkan dukungan Balai POM di Bogor, antara lain penyusunan rencana aksi pangan dan gizi daerah, Kota Pangan Aman, Kota Sehat, Pasar Pangan Sehat, sidak pasar, Gebyar Pelayanan Terpadu Daerah, pembentukan Tim Koordinasi dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan, pengawalan penggunaan Dana Alokasi Khusus oleh pemerintah daerah, dll. Balai POM di Bogor juga berperan aktif dalam penanggulangan penggunaan Obat dan Makanan Terlarang melalui inovasi TOT Cepot (Training of Trainer Cegah Penggunaan Obat dan Makanan Terlarang).

F. Membangun Jejaring Kerja sama dengan lintas sektor

Dalam penyelenggaraan pengawasan Obat dan Makanan, Balai POM di Bogor harus membangun kerja sama dengan pentahelix untuk menunjang pelaksanaan pengawasan obat dan makanan.

G. Perubahan iklim dan bencana

Ancaman perubahan iklim dunia, akan semakin dirasakan oleh sektor pertanian khususnya produk bahan Pangan di Indonesia. Perubahan iklim dapat mengakibatkan berkurangnya ketersediaan Pangan yang berkualitas, sehat, bermanfaat, dengan harga yang kompetitif. Dari sisi ekonomi makro, industri makanan dan minuman di masa yang akan datang perannya akan semakin penting sebagai pemasok Pangan dunia. Selain dari sisi Pangan, perubahan iklim juga dapat mengakibatkan munculnya bibit penyakit baru hasil mutasi gen dari berbagai virus. Bibit penyakit baru tersebut variannya menjadi cukup banyak dan mudah tersebar dari satu negara ke negara lain.

Menurut Kementerian Kesehatan yang bekerja sama dengan Research Center for Climate Change University of Indonesia (RCCC-UI) tahun 2013, dalam pelaksanaan kajian dan pemetaan model kerentanan penyakit infeksi akibat perubahan iklim, terdapat

3 (tiga) penyakit yang perlu mendapat perhatian khusus terkait perubahan iklim dan perkembangan vektor yaitu Malaria, Demam Berdarah Dengue (DBD), dan Diare. Selain dari ketiga jenis penyakit tersebut, masih terdapat penyakit yang banyak ditemukan akibat adanya perubahan iklim seperti, Infeksi Saluran Pernapasan (ISPA) dan Penyakit Batu Ginjal.

Dengan adanya potensi permasalahan serta peluang dari proses perubahan iklim, diperlukan peran Balai POM di Bogor dalam mengawasi peredaran varian Obat baru dari jenis penyakit tersebut. Selain dari Obat kimia, varian Obat baru ini juga diikuti pula dengan varian obat herbal tradisional Indonesia dan Cina yang paling banyak beredar di pasar. Kondisi ini menuntut kerja keras Balai POM di Bogor dalam melakukan pengawasan terhadap perkembangan produksi dan peredaran Obat tersebut.

H. Komitmen dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Balai POM di Bogor telah menyusun reformasi birokrasi (RB) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi (RB) 2010-2025. Upaya atau proses RB yang dilakukan Balai POM di merupakan pengungkit dalam pencapaian sasaran sebagai hasil yang diharapkan dari pelaksanaan RB.

a) Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran RB. Untuk menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan, Loka POM di Kabupaten Bogor telah membentuk *agent of change* sebagai *role model* serta forum bagi pembelajaran atau inovasi dalam proses perubahan yang dilakukan. Komitmen dan keterlibatan pimpinan dan seluruh pegawai Balai POM di Bogor secara aktif dan berkelanjutan merupakan unsur pendukung paling utama dalam perubahan pola pikir dan budaya kerja dalam rangka pelaksanaan RB.

Untuk mengurangi risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan dibutuhkan media komunikasi secara reguler untuk mensosialisasikan RB atau perubahan yang sedang dan akan dilakukan, termasuk pentingnya peran *agent of change* dan manfaat dari forum pembelajaran atau inovasi. Sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, Balai POM di Bogor berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan dan secara terus-menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan. Komitmen Balai POM di Bogor tersebut dilakukan melalui penerapan sistem mutu secara konsisten

dan ditingkatkan secara berkelanjutan yang dibuktikan dengan pemenuhan *Quality Management System ISO 9001:2015*.

b) Penataan Peraturan perundang-undangan dan Penegakan Hukum

Telah banyak Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang menjadi landasan teknis pelaksanaan tugas fungsi Balai POM di Bogor. Pada level operasional, Balai POM di Bogor telah memiliki Pedoman Pengawasan yang jelas untuk acuan dalam pengawasan Obat dan Makanan, juga menerbitkan standar mutu lainnya, seperti standar produksi dan distribusi Obat dan Makanan. Ketersediaan peraturan perundangan sampai dengan pedoman teknis yang dilegalkan dalam bentuk Peraturan Kepala BPOM tersebut sangat mendukung penegakan hukum. Tantangan ke depan, BPOM harus membuat terobosan dalam penegakan hukum seperti memperkuat kemitraan untuk pengawasan, penindakan, maupun persamaan persepsi dengan kepolisian, kejaksaan, dan instansi terkait, menggeser pengawasan ke area preventif, serta memperkuat kerjasama di *Free Trade Zone Area*. Upaya ini pun perlu diikuti dengan peningkatan kajian Balai POM di Bogor mengenai kerugian negara secara ekonomi maupun kesehatan akibat pelanggaran Obat dan Makanan

c) Penataan dan Penguatan Struktur Organisasi

Tantangan BPOM ke depan adalah melakukan kajian, penataan, dan evaluasi organisasi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. BPOM sebagai instansi vertikal, Balai POM di Bogor dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu, Balai POM di Bogor turut mendukung program BPOM terkait peningkatan efisiensi dan efektivitas organisasi tersebut di atas.

d) Penataan Tatalaksana

Sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, Balai POM di Bogor berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan dan secara terus-menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan. Komitmen Balai POM di Bogor tersebut dilakukan melalui penerapan sistem mutu secara konsisten dan ditingkatkan secara berkelanjutan yang dibuktikan dengan pemenuhan atau perolehan *Quality Management System ISO 9001: 2015*.

e) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Penataan sistem manajemen SDM aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur Loka POM di Kabupaten Bogor yang didukung oleh

sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Perencanaan kebutuhan pegawai Balai POM di Bogor dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan proses penerimaan pegawai dilakukan secara transparan, objektif, akuntabel, dan bebas KKN serta promosi jabatan dilakukan secara terbuka. Pengembangan pegawai yang dilakukan Balai POM di Bogor berbasis kompetensi yang selanjutnya capaian penilaian kinerja individu pegawai akan dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja. Hal ini diimbangi dengan penegakan aturan disiplin dan kode etik serta pemberian sanksi. Seluruh aktivitas manajemen SDM tersebut didukung oleh sistem informasi kepegawaian.

Saat ini, Balai POM di Bogor telah memiliki kualitas yang cukup memadai, namun dari sisi kuantitas SDM Balai POM di Bogor belum mencukupi kebutuhan untuk menjalankan tugas dan fungsi yang tersebar di wilayah kerja Balai POM di Bogor. Sistem manajemen pemerintah menuntut adanya ukuran keberhasilan, baik di tingkat organisasi sampai ke level individu. Untuk saat ini, sistem manajemen kinerja belum optimal diterapkan, sehingga perlu dilakukan penerapan sistem manajemen kinerja yang lebih efektif dan efisien terutama dalam hal pelaksanaan evaluasi terhadap peta dan kelas jabatan yang telah disusun. Pemanfaatan sistem informasi kepegawaian yang telah dibangun juga perlu dilakukan optimalisasi sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM Balai POM di Bogor.

K. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Penguatan Akuntabilitas Kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Balai POM di Bogor telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan baik. Komitmen pimpinan yang sangat tinggi terhadap pelaksanaan SAKIP menjadi kekuatan penting dalam upaya penguatan akuntabilitas kinerja Balai POM di Bogor. Namun, Balai POM di Bogor masih perlu melakukan penyempurnaan dalam penatausahaan manajemen pemerintahan (keuangan dan BMN) dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel. Ke depan, untuk menjawab ekspektasi masyarakat terhadap akuntabilitas Balai POM di Bogor selaku institusi pengawasan.

L. Penguatan Pengawasan

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Melalui upaya pengawasan yang dilakukan Balai POM di Bogor, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan Balai POM di Bogor serta

menghindari tingkat penyalahgunaan wewenang. Pengawasan yang dilakukan Balai POM di Bogor antara lain melalui kebijakan penanganan gratifikasi, penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), pengelolaan pengaduan masyarakat, implementasi whistle-blowing system, penanganan benturan kepentingan. Untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal, upaya pengawasan yang dilakukan Balai POM di Bogor tersebut masih perlu dievaluasi agar dapat ditingkatkan pelaksanaannya.

M. Pelayanan Publik

Menyadari bahwa pada hakekatnya instansi pemerintah merupakan ‘pelayan masyarakat’, Balai POM di Bogor senantiasa berbenah diri untuk dapat memberikan kualitas pelayanan publik yang prima. Balai POM di Bogor menyediakan Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) untuk memberikan informasi terkait pengawasan Obat dan Makanan kepada masyarakat, antara lain layanan tatap muka langsung, layanan telepon, Whatsapp, email: bpom_bogor@pom.go.id, psblokapombogor@gmail.com Facebook Balai POM di Bogor, Twitter, Instagram @bpom.bogor.

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

2.1 URAIAN SINGKAT RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra K/L adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, yang merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2025-2029, hal itu tertuang pada Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.

BPOM yang merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian melaksanakan penyusunan Rencana Strategis dengan mengacu pada arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang tertuang dalam Perpres No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN TAHUN 2025-2029. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disebut RPJMN, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Dalam hal ini, RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden hasil Pemilihan Umum tahun 2024.

Secara garis besar, lingkungan strategis yang dihadapi oleh BPOM khususnya Balai POM di Bogor sebagai salah satu Unit Pelayanan Teknis (UPT) pada tahun 2025- 2029 terdiri atas 2 (dua) isu pokok, yaitu eksternal dan internal. Isu eksternal antara lain Sistem Kesehatan Nasional (SKN), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Globalisasi, Perdagangan Bebas dan Komitmen Internasional, Perubahan Iklim, Perubahan Demografi, Ekonomi dan Sosial Masyarakat, Tuntutan masyarakat, Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Jejaring Kerja, Komitmen dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Adapun untuk isu internal adalah Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan, Sumber Daya Manusia, dan Sarana Prasarana.

Diharapkan output dan outcome dari pelaksanaan program dan kegiatan BPOM Tahun 2025- 2029 tersebut menjadi bentuk konkrit kontribusi BPOM terhadap pencapaian agenda Nawacita nasional, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Untuk itu, capaian target outcome dan output akan dipantau secara berkala, dan dievaluasi pada akhir periode Rencana Strategis/RPJMN sebagai impact assessment.

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Balai POM di Kabupaten Bogor melalui Renstra yang telah disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Unit Pelaksana Teknis BPOM yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM serta Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi

Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia khususnya Wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan Kota Depok sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan impact dari berbagai hasil (outcome) yang ingin diwujudkan Balai POM di Bogor dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/ taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

2.1.1 VISI

Visi dan misi pembangunan nasional untuk tahun 2025 – 2029 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2025- 2029 adalah Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

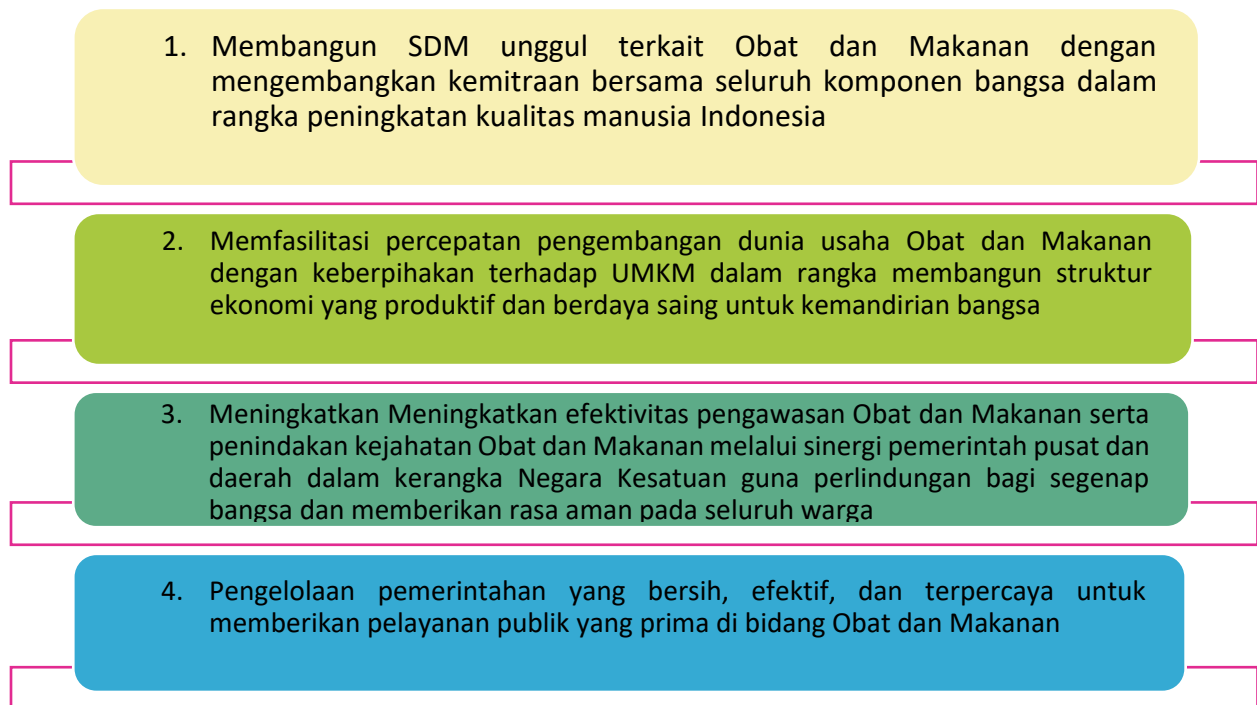
Sesuai dengan peran dan kewenangan unit kerja/organisasi, Balai POM di Bogor harus memberikan kontribusi yang sesuai dengan tugas pokok serta fungsinya bagi keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Badan POM periode 2025-2029. Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional, Badan POM telah menetapkan visi yang akan dicapai sesuai Rencana Strategis periode 2025-2029 adalah:

” Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

Visi Badan POM merupakan komitmen Balai POM di Bogor dalam perannya sebagai unit pendukung Badan POM dalam pengawasan Obat dan Makanan.

2.1.2 MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka Balai POM di Bogor mempunyai misi yang sama dengan misi Badan POM, yaitu:



Gambar 3 Misi Balai POM di Bogor

2.2 SASARAN KEGIATAN

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Badan POM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Badan POM. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) ke depan diharapkan Badan POM akan dapat menapai sasaran strategis.

Sasaran Strategis Balai POM di Bogor dirumuskan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai POM di Bogor. Sasaran Strategis Balai POM di Bogor diturunkan mengambil sasaran.

strategis Badan POM yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai POM di Bogor, sehingga sasaran strategis Balai POM di Bogor yaitu:

- h. Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
- i. Menguatnya kapasitas laboratorium BPOM dalam mendukung pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
- j. Meningkatnya kesadaran masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang bermutu
- k. Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industry dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
- l. Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

- m. Layanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
- n. Terwujudnya organisasi dan tata kelola BPOM yang berintegritas dan adaptif

Sedangkan Sasaran Kegiatan Balai POM di Bogor sebanyak 11 (sebelas) dan dan Indikator Kegiatan sebanyak 25 (dua puluh lima), sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

2. **Stakeholder Perspective:**

a. **Sasaran Kegiatan-1: Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT)**

Sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU):

- 1) Persentase Sediaan Farmasi yang dip dengan target sebesar 88,5% di tahun 2029;
- 2) Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan Kejadian Tidak Diinginkan (KTD)/Efek Samping Obat (ESO) ke Balai POM dengan target sebesar 30% di tahun 2029;
- 3) Persentase Pangan Olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target sebesar 83% di tahun 2029;
- 4) Persentase Sampel Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar dengan target sebesar 100% di tahun 2029;
- 5) Persentase Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target 85% di tahun 2029.

b. **Sasaran Kegiatan-2: Meningkatnya tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor**

- 1) Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu dengan target sebesar 88,5% di tahun 2029;

c. **Sasaran Kegiatan-3: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**

- 1) Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan target sebesar 83% di tahun 2029;
- 2) Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan target sebesar 75% di tahun 2029;
- 3) Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan target sebesar 95% di tahun 2029;
- 4) Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan target sebesar 85% di tahun 2029;
- 5) Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan dengan target sebesar 90,20% di tahun 2029.

3. Internal Process Perspective:

a. Sasaran Kegiatan ke-4: Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi.

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator:

- 1) Persentase Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan target sebesar xx% di tahun 2029;.

b. Sasaran Kegiatan ke-5: Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT.

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator:

- 1) Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium (SKL), dengan target sebesar 25% di tahun 2029;

c. Sasaran Kegiatan ke-6: Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di masing-masing wilayah kerja UPT.

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, dengan indikator:

- 1) Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT, dengan target sebesar 87,32% di tahun 2029;
- 2) Jumlah Sekolah Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) aman, dengan target sebesar 5 di tahun 2029;
- 3) Jumlah Desa Pangan Aman, dengan target sebesar 3 di tahun 2029;
- 4) Jumlah Pasar Pangan Aman berbasis komunitas, dengan target sebesar 1 di tahun 2029.

d. Sasaran Kegiatan ke-7: Meningkatnya pendampingan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu.

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu:

- 1) Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB) Pangan Olahan, dengan target sebesar 82% pada akhir 2029.

e. Sasaran Kegiatan ke-8: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT.

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu:

- 1) Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT, dengan target sebesar 100% pada akhir 2029.

f. Sasaran Kegiatan ke-9: Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif.

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu:

- 1) Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT, dengan target sebesar 94% pada akhir 2029.

g. Sasaran Kegiatan ke-10: Layanan Publik UPT yang Prima.

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu:

- 1) Indeks Pelayanan Publik UPT, dengan target sebesar 4,60 pada akhir 2029.

4. **Learning and Growth Perspective**

a. **Sasaran Kegiatan ke-11: Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal.**

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

- 1) Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) UPT Badan POM, dengan target 81% pada akhir 2029;
- 2) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) UPT Badan POM, dengan target 81,50% pada akhir 2029;
- 3) Nilai Kinerja Anggaran UPT Badan POM, dengan target 4 di tahun 2029;
- 4) Indeks Manajemen risiko UPT Badan POM, dengan target 3 di tahun 2029;

2.3 **RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)**

Untuk mewujudkan perencanaan yang selaras antara Rencana Strategis (Renstra) dengan penyusunan anggaran, maka disusunlah Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2025 sebagai dasar penyusunan anggaran tahun 2025. Rencana Kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah

Tabel 1 Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di Bogor Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT).	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan Kejadian Tidak Diinginkan (KTD)/Efek Samping Obat (ESO) ke Balai POM	26
		Persentase Pangan Olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase Sampel Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar.	75
		Persentase Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
2	Meningkatnya tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.	100
		Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
4	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
5	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium (SKL)	14
6	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	93,20
		Jumlah Sekolah Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) aman	4
		Jumlah Desa Pangan Aman.	1
		Jumlah Pasar Pangan Aman berbasis komunitas.	1
7	Meningkatnya pendampingan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu.	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB) Pangan Olahan.	80
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.	82
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif.	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14
10	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,51

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
11	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) UPT Badan POM	90
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) UPT Badan POM	80,72
		Nilai Kinerja Anggaran UPT Badan POM.	90,50
		Indeks Manajemen Risiko UPT Badan POM	3,20

2.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Balai POM di Bogor menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Balai POM di Bogor tahun 2025-2029 dan DIPA Balai POM di Bogor Tahun Anggaran 2025 dengan jumlah anggaran sebesar 9.774.448.000 (Sembilan Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah), Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2025 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Balai POM di Bogor, sebagai berikut:

Tabel 2 Perjanjian Kinerja Balai POM di Bogor Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT.	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82,5
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	88

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	65
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,5
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	82
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	63
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	14
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing- masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	83,96
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	4
		Jumlah desa pangan aman	1
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	91
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	80
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90
8	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,2

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	77
		Nilai AKIP UPT BPOM	79,5
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	4
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,6

2.5 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA BOGOR TAHUN 2025

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2025 menyajikan target triwulan yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Balai POM di Bogor beserta anggarannya sebagaimana tabel dibawah

Terdapat revisi RAPK yang ditetapkan di awal tahun 2025. Adapun RAPK yang ditetapkan di awal tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 3 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Bogor Tahun 2025

No .	Indikator Kinerja	Target (%)												Anggaran
		B0 1	B0 2	B03	B0 4	B0 5	B0 6	B0 7	B0 8	B0 9	B1 0	B1 1	B12	(Rupiah)
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	116.695.000
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	49.600.000
	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	42.945.600
	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	21.579.650
	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	3.734.400
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	5	12	20	26	32	40	48	56	64	72	80	88	64.738.950

[illegible]

8	Indeks Pelayanan Publik UPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,2	143.600.000
9	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	1.521.811.750
	Nilai AKIP UPT BPOM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,5	1.521.811.750
	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1.521.811.750
	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,2	1.521.811.750

2.6 KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR

Keberhasilan suatu sasaran kegiatan dapat diukur melalui capaian indikator sasaran kegiatan atau yang biasa disebut indikator kinerja. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran kegiatan sesuai definisi operasional indikator yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja, dengan rumus dibawah ini:

Rumus Pengukuran **INDIKATOR POSITIF**
(semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya)

Rumus Pengukuran **INDIKATOR NEGATIF**
(semakin tinggi realisasinya, semakin buruk kinerjanya)

Rumus Pengukuran **INDIKATOR NEGATIF** yang satuannya **BUKAN DALAM %**
(semakin tinggi realisasinya, semakin buruk kinerjanya)

Untuk sasaran kegiatan yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, nilai pencapaian sasaran dihitung berdasarkan capaian rata-rata indikator dari sasaran. Indikator kinerja utama (IKU) diberi bobot lebih tinggi (2 kali) karena mempunyai kontribusi yang lebih besar terhadap pencapaian sasaran. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) seperti dibawah ini.

Nilai pencapaian sasaraannya (NPS) adalah rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya (1).

$$NPS\ 2 = \frac{1NPI\ 1 + 1NPI\ 2}{2}$$

$$NPS\ 3 = \frac{1NPI\ 1 + 1NPI\ 2 + 1NPI\ 3}{3}$$

$$NPS\ 4 = \frac{1NPI\ 1 + 1NPI\ 2 + 1NPI\ 3 + 1NPI\ 4}{4}$$

$$NPS\ 5 = \frac{1NPI\ 1 + 1NPI\ 2 + 1NPI\ 3 + 1NPI\ 4 + 1NPI\ 5}{5}$$

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>120%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 120%	
Baik	=100%	
Cukup	70% ≤ x < 100%	
Kurang	<70%	

Gambar 9 Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sesuai dengan yang tercantum di dalam Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029 dan Penetapan Kinerja tahun 2025 Balai POM di Bogor memuat 10 (sepuluh) sasaran kegiatan. Pencapaian kesepuluh sasaran kegiatan Balai POM di Bogor pada triwulan I tahun 2025 secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN TRIWULAN I TAHUN 2025

SASARAN KEGIATAN	Nilai Pencapaian Sasaran Strategis	KATEGORI	
1. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Bogor	158,21	Tidak Dapat Disimpulkan	
2. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	133,33	Tidak Dapat Disimpulkan	
3. Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Bogor	197,50	Tidak Dapat Disimpulkan	
4. Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Bogor	60,58	Kurang	
5. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	58,35	Kurang	
6. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT.	191,67	Tidak Dapat Disimpulkan	
7. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Bogor	100	Baik	
8 Layanan Publik UPT yang prima	Baru dilakukan penilaian di akhir tahun		
9. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Unit Organisasi yang optimal	Baru dilakukan penilaian di akhir tahun		
10. Meningkatnya kepuasan masyarakat dan pelaku usaha pengguna layanan atas kinerja penyelenggaraan pelayanan publik BPOM	Baru dilakukan penilaian di akhir tahun		

Sasaran kegiatan yang ditetapkan diukur dengan 26 (dua puluh enam) indikator kinerja utama. Secara lengkap perbandingan target dan realisasi setiap indikator kinerja utama dari masing-masing sasaran kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4 PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN PERSENTASE CAPAIAN PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TRIWULAN I TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Bogor	1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82,5	97,16	117,77	Sangat Baik
		2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	-	-	-
		3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	80	106,67	Sangat Baik
		4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	-	-	-
		5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	85	113,33	Baik
		6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	88	158,06	179,61	Tidak Dapat Disimpulkan
		7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	100	133,33	Tidak Dapat Disimpulkan
		8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	65	100	153,85	Tidak Dapat Disimpulkan
		9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,5	70	77,35	Cukup
		10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	100	133,33	Tidak Dapat Disimpulkan
		11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	82	93,82	114,41	Sangat Baik
		Nilai Pencapaian Sasaran Strategis			158,21	Tidak Dapat Disimpulkan
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	15	20	133,33	Tidak Dapat Disimpulkan
		Nilai Pencapaian Sasaran Strategis			133,33	Tidak Dapat Disimpulkan
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	13. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	4	7,9	197,5	Tidak Dapat Disimpulkan
		Nilai Pencapaian Sasaran Strategis			197,5	Tidak Dapat Disimpulkan
4	Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14. Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	83,96	85,92	102,33	Sangat Baik

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
		15. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	20	10	50	Kurang
		16. Jumlah Desa Pangan Aman	25	10	40	Kurang
		17. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	20	10	50	Kurang
		Nilai Pencapaian Sasaran Strategis			60,58	Kurang
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	20	11,67	58,35	Kurang
		Nilai Pencapaian Sasaran Strategis			58,35	Kurang
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19. Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT	15	28,75	191,67	Tidak Dapat Disimpulkan
		Nilai Pencapaian Sasaran Strategis			120	Sangat Baik
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	20. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.	50	50	100	Baik
		Nilai Pencapaian Sasaran Strategis			100	Baik
8	Layanan Publik UPT yang prima	21. Indeks Pelayanan Publik UPT	4,2	3,69	87,86	Cukup
		Nilai Pencapaian Sasaran Strategis			87,86	Cukup
9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Unit Organisasi yang optimal	22. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	77			
		23. Nilai AKIP UPT	79,5			
		24. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	4			
		25. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,6			
		Nilai Pencapaian Sasaran Strategis			-	
10	Meningkatnya kepuasan masyarakat dan pelaku	26. Indeks Kepuasan Masyarakat	91,5	-		

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
	usaha pengguna layanan atas kinerja penyelenggaraan pelayanan publik BPOM	Nilai Pencapaian Sasaran Strategis				-

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Balai POM di Bogor, sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN KE-1: Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Bogor

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 11 (sebelas) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Dari perhitungan kesebelas indikator tersebut, diperoleh hasil rata-rata capaian sebesar **102,46%** dengan kategori **Sangat Baik**. Hasil Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6 CAPAIAN KINERJA SARAN KEGIATAN KE-1 TAHUN 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI	
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82,5	97,16	117,77	Sangat Baik	
	2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	-			
	3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	80	106,67	Sangat Baik	
	4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	-			
	5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	85	113,33	Sangat Baik	
	6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	20	158,06	790,30	Tidak Dapat Disimpulkan	
	7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	100	133,33	Tidak Dapat Disimpulkan	

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI	
	8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	65	100	153,85	Tidak Dapat Disimpulkan	
	9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,5	70	77,35	Cukup	
	10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	100	133,33	Tidak Dapat Disimpulkan	
	11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	82	93,82	114,41	Sangat Baik	

Penjelasan mengenai capaian indikator sasaran kegiatan kesatu, sebagai berikut:

3.1.1.1 Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

- Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik.
- Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian.
- Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil.
- Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku.
- Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait

Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

$$= (A + B + C + D) / 4$$

- A. Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $a+b+c+d+e$
- B. Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(a+b+c+d+e)/5$
- C. Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(a+b+c+d+e)/5$
- D. Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(a+b+c+d+e)/5$

Tabel 5 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “PERSENTASE SAMPEL SEDIAAN FARMASI BERISIKO YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN” TRIWULAN I TAHUN 2025

INDIKATOR KEGIATAN	TW I TAHUN 2025		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82,5	97,16	117,77	Sangat Baik	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN 1 TAHUN 2025

Pada Trwiulan I Tahun 2025 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 82,50%. Persentase realisasi target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 97,16% dengan memperoleh persentase capaian sebesar 117,77% dan memperoleh kriteria **Sangat Baik**.

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2025 DENGAN TRIWULAN SEBELUMNYA

Realisasi dan capaian triwulan I tahun 2025 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025 DENGAN TARGET TAHUN 2025

Realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan I tahun 2025 telah mencapai target Tahun 2025 dengan kriteria capaian **Melampaui**. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah.

Tabel 6 Perbandingan Realisasi “Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan” triwulan I tahun 2025

INDIKATOR KEGIATAN	TW 1 TAHUN 2025		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82,5	97,16	117,77	Tercapai/ Melampaui	

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

Kriteria capaian yang melampaui pada realisasi persentase sampel sediaan farmasi yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan ini adalah karena tim yang kompak dan perencanaan serta penyesuaian jadwal sampling yang sudah diatur di awal tahun dan adanya ketersediaan dana

yang mencukupi. Selain itu, terjalinnya koordinasi tim antara petugas sampling, petugas pengiriman pengujian dan dukungan manajerial yang solid dalam menyelesaikan target sampel berjalan dengan fleksibilitas saat adanya pemotongan efisiensi

**E. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN
ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA**

Dalam kegiatan melaksanakan sampling dan pengujian produk sesuai dengan Pedoman Sampling dan Pengujian, tentu sangat ditunjang oleh mobilitas yang didukung dengan alat transportasi yang dibiayai oleh DIPA. Apabila terjadi permasalahan pada kebutuhan transportasi tentu akan berpengaruh signifikan pada kegiatan sampling. Untuk pelaporan hasil uji melalui SIPT, selain itu dalam rangka meningkatkan kompetensi petugas pengawas dan penguji, diarahkan mengikuti pelatihan pengembangan kompetensi yang tersedia di IDEAS.

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel 7 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya TW 1

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase Sediaan sampel Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	21.410.000	6.819.902	31,85	117,77	75 % (Tidak Efisien)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran adalah efisien dengan tingkat efisiensi 75% dan capaian indikator 117,77%, sedangkan realisasi anggaran masih kecil (kurang dari 100%).

3.1.1.2 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) adalah kejadian medis yang tidak diinginkan yang terjadi selama terapi menggunakan obat tetapi belum tentu disebabkan oleh obat tersebut. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans) Efek Samping Obat (ESO) adalah respon terhadap suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan dan yang terjadi pada dosis yang biasanya digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis, atau terapi penyakit atau untuk modifikasi fungsi fisiologik. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans) Persentase fasilitas pelayanan

kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dihitung berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM

$$= (A / B) \times 100\%$$

Keterangan:

- A. merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan
- B. Merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM.

Tabel 8 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO” TW I TAHUN 2025

INDIKATOR KEGIATAN	TW I TAHUN 2025		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	-	-	-	-

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN 1 TAHUN 2025

Pada triwulan I tahun 2025 belum diperoleh nilai Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO. Nilai akan diperoleh pada akhir tahun 2025.

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2025 DENGAN TRIWULAN SEBELUMNYA

Realisasi dan capaian triwulan I tahun 2025 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025 DENGAN TARGET TAHUN 2025

Belum tersedia realisasi Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO pada triwulan I tahun 2025. Realisasi akan diperoleh pada akhir tahun 2025. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah.

Tabel 9 Perbandingan Realisasi “Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO” triwulan I tahun 2025

INDIKATOR KEGIATAN	TW 1 TAHUN 2025		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	-	-	-	-

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

Analisis belum bisa dilaksanakan pada TW ini karena nilai capaian belum ada pada TW berjalan.

E. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Kegiatan ini sangat didukung oleh adanya kerjasama dan kolaborasi dengan instansi lain yang akan saling menguatkan dalam peningkatan pelayanan

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel 10 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya TW 1

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	900.000	0	0	-	-

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran belum dapat diukur di TW 1 2025. Melakukan koordinasi dengan instansi lain bisa dilaksanakan secara efektif dan secukupnya melalui media yang bisa menyesuaikan seperti dengan zoom meeting

3.1.1.3 Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga. Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling. Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling

serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya. Diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling adalah pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi:

- 1. kesesuaian target sampel UPT;
- 2. kesesuaian parameter uji;
- 3. ketepatan pengambilan kesimpulan;
- 4. ketepatan waktu pengambilan sampel; dan
- 5. ketepatan pelaporan sampling dan pengujian

Hasil Perbandingan Target dengan Realisasi Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan oleh Balai POM di Bogor Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 11 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan TRIWULAN I TAHUN 2025

INDIKATOR KEGIATAN	TW 1 TAHUN 2025		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	80	106,67	Sangat Baik	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN 1 TAHUN 2025

Pada Trwiulan I Tahun 2025 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 75%. Persentase realisasi target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 80% dengan memperoleh persentase capaian sebesar 106,67% dan memperoleh kriteria **Sangat Baik**.

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2025 DENGAN TRIWULAN SEBELUMNYA

Realisasi dan capaian triwulan I tahun 2025 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025 DENGAN TARGET TAHUN 2025

Realisasi Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan I tahun 2025 telah mencapai target Tahun 2025 dengan kriteria capaian **Melampaui**. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah.

Tabel 12 Perbandingan Realisasi “Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan” triwulan I tahun 2025

INDIKATOR KEGIATAN	TW 1 TAHUN 2025		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	80	106,67	Tercapai/ Melampaui	

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA) UNIT KERJA LAIN YANG SEJENIS

Keberhasilan pencapaian target TW 1 di tengah efisiensi anggaran memerlukan penyesuaian yang didukung oleh tingginya komitmen dan kinerja petugas pengawasan di lapangan yang secara konsisten melakukan sampling dan pengujian sampel pangan olahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu koordinasi dan komunikasi dengan instansi lain dan pelaku usaha terjalin dengan, sehingga proses tindak lanjut terhadap hasil pengawasan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat sasaran. Adanya monitoring dan evaluasi internal rutin untuk memastikan setiap tahapan proses pengawasan dan tindak lanjut

E. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Agar kegiatan dapat tercapai dengan lancar maka diadakan koordinasi dengan Balai Penguji dan Balai Regional untuk pelaksanaan Sampling serta diikuti dengan melaksanakan sampling dan pengujian produk sesuai dengan Pedoman Sampling dan Pengujian, Selain itu, untuk meningkatkan pengawasan dengan memberikan pembinaan dan sanksi kepada sarana produksi dan distribusi yang tidak sesuai. Kegiatan monev bulanan juga dilakukan untuk memantau program ini.

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel 13 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya TW 1

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	6.119.840	4.691.356	76,66	106,67	95 % (Efisien)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran adalah efisien dengan tingkat efisiensi 95% dan capaian indikator 106,67%, sedangkan realisasi anggaran sudah 76,66%.

3.1.1.4 Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk Pangan Olahan Dalam Kemasan (PODK) juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan:

- 1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; dan
- 2. Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar:

$$\frac{\text{Jumlah Sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar}}{\text{Total jumlah sampel KLB keracunan pangan dikirim atau diuji ke BPOM}} \times 100\%$$

Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel dibawah.

Tabel 14 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar TRIWULAN I TAHUN 2025

INDIKATOR KEGIATAN	TW 1 TAHUN 2025		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	-	-	-	-

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN 1 TAHUN 2025

Pada triwulan I tahun 2025 belum diperoleh nilai Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar.

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2025 DENGAN TRIWULAN SEBELUMNYA

Realisasi dan capaian triwulan I tahun 2025 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025 DENGAN TARGET TAHUN 2025

Belum tersedia realisasi Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar pada triwulan I tahun 2025. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah.

Tabel 15 Perbandingan Realisasi “Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan” triwulan I tahun 2025

INDIKATOR KEGIATAN	TW 1 TAHUN 2025		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	-	-	-	-

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

Berdasarkan tidak adanya kejadian luar biasa yang terjadi di wilayah kerja Balai POM Bogor pada periode TW I 2025 maka nilai yang diperoleh seperti di atas

E. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Kejadian luar biasa dapat dikurangi dengan memberikan penyuluhan sebagai bekal pengetahuan kepada masyarakat

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel 16 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya TW 1

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	22.452.650	1.142.875	5,09	-	-

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran belum dapat diikur di TW 1 2025. Tingkat kesadaran dari masyarakat memegang peranan penting dalam kejadian KLB, semakin sadar dalam pentingnya higiene pangan, semakin jarang ditemukan kejadian. Penggunaan tenaga penyuluh dari masyarakat itu sendiri, sangat berperan lebih intens dalam menanamkan kesadaran masyarakat

3.1.1.5 Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan.

- a. Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling.
- b. Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya
- c. Diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan).

Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya adalah tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah

Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel dibawah.

Tabel 17 Perbandingan Realisasi “Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan” triwulan I tahun 2025

INDIKATOR KEGIATAN	TW 1 TAHUN 2025		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	85	113,33	Sangat Baik	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN 1 TAHUN 2025

Pada Trwiulan I Tahun 2025 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 75%. Persentase realisasi target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 85% dengan memperoleh persentase capaian sebesar 113,33% dan memperoleh kriteria **Sangat Baik**.

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2025 DENGAN TRIWULAN SEBELUMNYA

Realisasi dan capaian triwulan I tahun 2025 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025 DENGAN TARGET TAHUN 2025

Realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan I tahun 2025 telah mencapai target Tahun 2025 dengan kriteria capaian **Melampaui**. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah.

Tabel 18 Perbandingan Realisasi “Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan” triwulan I tahun 2025

INDIKATOR KEGIATAN	TW 1 TAHUN 2025		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	85	113,33	Tercapai/ Melampaui	

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

Kegiatan pada TW 1 ini dilakukan dalam keterbatasan dana namun dilakukan pembagian tugas dan jadwal yang lebih ketat sehingga pelaksanaan sampling bisa dilakukan dengan baik.

E. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Program ini didukung oleh penyediaan sarana transportasi dan perintah penugasan personel yang kompeten dan memiliki komitmen terbaik dalam melaksanakan tugas

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel 19 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya TW 1

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	532.160	407.944	76,66	113,33	92 % (Efisien)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran adalah efisien dengan tingkat efisiensi 92% dan capaian indikator 113,33%, sedangkan realisasi anggaran sudah 76,66%.

3.1.1.6 Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh Balai POM di Bogor kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, sarana distribusi, dan sarana pelayanan kefarmasian yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

Stakeholder/pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha sebagai objek pengawasan dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel dibawah.

Tabel 20 Perbandingan Realisasi “Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder” triwulan I tahun 2025

INDIKATOR KEGIATAN	TW 1 TAHUN 2025		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	20	158,06	790,30	Tidak Dapat Disimpulkan	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN 1 TAHUN 2025

Pada Triwulan I Tahun 2025 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder sebesar 20%. Persentase realisasi target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 158,06% dengan memperoleh persentase capaian sebesar 790,30% dan memperoleh kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2025 DENGAN TRIWULAN SEBELUMNYA

Realisasi dan capaian triwulan I tahun 2025 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025 DENGAN TARGET TAHUN 2025

Realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan I tahun 2025 telah mencapai target Tahun 2025 dengan kriteria capaian **Melampaui**. Secara

lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah.

Tabel 21 Perbandingan Realisasi “Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder” triwulan I tahun 2025

INDIKATOR KEGIATAN	TW 1 TAHUN 2025		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	88	158,06	179,61	Tercapai/ Melampaui	

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

Tercapainya target indikator kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder triwulan I 2025 disebabkan antara lain:

- a. Adanya efisiensi anggaran pengawasan pada triwulan I tahun 2025 menyebabkan kesulitan transportasi dimana kendala transportasi menjadi hal utama yang menyebabkan akses langsung kepada sarana menjadi berkurang. Hal ini diselesaikan dengan menyewa kendaraan online untuk petugas sehingga jumlah keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan bisa sesuai target.
- b. Adanya kemudahan pelaporan tindakan perbaikan yang dilakukan oleh pelaku usaha.

E. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Program sosialisasi pengetahuan merupakan kegiatan yang sangat mendukung pelaku usaha untuk terus berkembang. Selain itu kemudahan pelaporan secara online dengan email dan konsultasi WA menjadi dukungan tersendiri

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel 22 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya TW 1

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	227.499.800	12.206.150	5,37	179,61	75 % (Tidak Efisien)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran adalah efisien dengan tingkat efisiensi 75% dan capaian indikator 179,61%, sedangkan realisasi anggaran masih kecil (kurang dari 100%).

3.1.1.7 Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana produksi sediaan farmasi yaitu meliputi:

- 1) Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit).
- 2) Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, industri ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), dan industri suplemen kesehatan.
- 3) Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

Sarana produksi sediaan farmasi tersebut diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahapan, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Sarana produksi sediaan farmasi tersebut diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Cara Perhitungan Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah rata-rata dari % Sarana Produksi Obat, % Sarana Produksi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, % Sarana Produksi Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel dibawah.

Tabel 23 Perbandingan Realisasi “Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” triwulan I tahun 2025

INDIKATOR KEGIATAN	TW 1 TAHUN 2025		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	100	133,33	Tidak Dapat Disimpulkan	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN 1 TAHUN 2025

Pada Triwulan I Tahun 2025 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 75%. Persentase realisasi target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 158,06% dengan memperoleh persentase capaian sebesar 133,33% dan memperoleh kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2025 DENGAN TRIWULAN SEBELUMNYA

Realisasi dan capaian triwulan I tahun 2025 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025 DENGAN TARGET TAHUN 2025

Realisasi Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan I tahun 2025 telah mencapai target Tahun 2025 dengan kriteria capaian **Melampaui**. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah.

Tabel 24 Perbandingan Realisasi “Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” triwulan I tahun 2025

INDIKATOR KEGIATAN	TW 1 TAHUN 2025		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	100	133,33	Tercapai/ Melampaui	

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

Keb keberhasilan dari kegiatan ini didukung dengan pelaku usaha yang kooperatif, dan personel yang kompeten dalam bidangnya

E. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Dengan adanya efisiensi maka akan diadakan koordinasi dengan pusat, penambahan sarana transportasi secara sewa dan pendekatan informasi yang lebih intensif kepada pelaku usaha agar mengurangi miskomunikasi

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel 25 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya TW 1

Indikator Kinerja		Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase produksi	sarana Sediaan	227.499.800	12.206.150	5,37	133,33	75 % (Tidak Efisien)

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan					

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran adalah efisien dengan tingkat efisiensi 75% dan capaian indikator 133,33%, sedangkan realisasi anggaran masih kecil (kurang dari 100%).

3.1.1.8 Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang dianggap berisiko berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku, termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan.

Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain.Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:

1. Ketepatan waktu tindak lanjut, dan
2. Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan

Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel dibawah.

Tabel 26 Perbandingan Realisasi “Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” triwulan I tahun 2025

INDIKATOR KEGIATAN	TW 1 TAHUN 2025		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	65	100	153,85	Tidak Dapat Disimpulkan	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN 1 TAHUN 2025

Pada Triwulan I Tahun 2025 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar

65%. Persentase realisasi target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 100% dengan memperoleh persentase capaian sebesar 153,85% dan memperoleh kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2025 DENGAN TRIWULAN SEBELUMNYA

Realisasi dan capaian triwulan I tahun 2025 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025 DENGAN TARGET TAHUN 2025

Realisasi Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan I tahun 2025 telah mencapai target Tahun 2025 dengan kriteria capaian **Melampaui**. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah.

Tabel 27 Perbandingan Realisasi “Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” triwulan I tahun 2025

INDIKATOR KEGIATAN	TW 1 TAHUN 2025		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	65	100	153,85	Tercapai/ Melampaui	

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

Transportasi merupakan kendala utama yang menjadi ganjalan dalam pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi. Sehingga diusahakan adanya proses pengadaan sewa kendaraan untuk dapat digunakan selama satu tahun

E. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Penyampaian informasi yang merata kepada masyarakat melalui KIE merupakan hal

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel 28 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya TW 1

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	227.499.800	12.206.150	5,37	153,85	75 % (Tidak Efisien)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran adalah efisien dengan tingkat efisiensi 75% dan capaian indikator 153,85%, sedangkan realisasi anggaran masih kecil (kurang dari 100%).

3.1.1.9 Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:

- a. Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian;
- b. Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer;
- d. Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi. Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada tahun berjalan. Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait

Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel dibawah.

Tabel 29 Perbandingan Realisasi “Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” triwulan I tahun 2025

INDIKATOR KEGIATAN	TW 1 TAHUN 2025		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,5	70	77,35	Cukup	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN 1 TAHUN 2025

Pada Triwulan I Tahun 2025 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 90,5%. Persentase realisasi target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 70% dengan memperoleh persentase capaian sebesar 77,35% dan memperoleh kriteria **Cukup**.

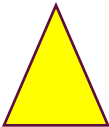
B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2025 DENGAN TRIWULAN SEBELUMNYA

Realisasi dan capaian triwulan I tahun 2025 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025 DENGAN TARGET TAHUN 2025

Realisasi Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan I tahun 2025 belum mencapai target Tahun 2025 dengan kriteria capaian **Akan Tercapai**. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah.

Tabel 30 Perbandingan Realisasi “Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” triwulan I tahun 2025

INDIKATOR KEGIATAN	TW 1 TAHUN 2025		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,5	70	77,35	Akan Tercapai	

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

Kendala transportasi menjadi hal utama yang menyebabkan akses langsung kepada sarana menjadi berkurang. Hal ini diselesaikan dengan menyewa kendaraan untuk petugas

E. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Dengan adanya efisiensi maka akan diadakan koordinasi dengan pusat, penambahan sarana transportasi secara sewa dan pendekatan informasi yang lebih intensif kepada pelaku usaha agar mengurangi miskomunikasi

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel 31 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya TW 1

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	112.263.250	5.714.375	5,09	77,35	75 % (Tidak Efisien)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran adalah efisien dengan tingkat efisiensi 75% dan capaian indikator 77,35%, sedangkan realisasi anggaran masih kecil (kurang dari 100%). Jumlah personel yang sedikit menyisakan pembagian tugas yang melebihi kemampuan sehingga diperlukan pembagian yang disesuaikan dengan urgensinya

3.1.1.10 Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

- Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan
- a. Diperiksa melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan cangkupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan
- b. Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi:
 1. Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa
 2. Ketepatan waktu pelaporan
 3. Kesesuaian tindak lanjut (TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.

Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel dibawah.

Tabel 32 Perbandingan Realisasi “Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” triwulan I tahun 2025

INDIKATOR KEGIATAN	TW 1 TAHUN 2025		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	100	133,33	Tidak Dapat Disimpulkan	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN 1 TAHUN 2025

Pada Triwulan I Tahun 2025 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 75%. Persentase realisasi target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 100% dengan memperoleh persentase capaian sebesar 133,33% dan memperoleh kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2025 DENGAN TRIWULAN SEBELUMNYA

Realisasi dan capaian triwulan I tahun 2025 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025 DENGAN TARGET TAHUN 2025

Realisasi Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan I tahun 2025 telah mencapai target Tahun 2025 dengan kriteria capaian **Melampaui**. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah.

Tabel 33 Perbandingan Realisasi “Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” triwulan I tahun 2025

INDIKATOR KEGIATAN	TW 1 TAHUN 2025		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	100	133,33	Tercapai/ Melampaui	

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

Peningkatan kesadaran pada masyarakat sangat berperan dalam pencapaian target ini serta koordinasi yang baik dengan instansi lain

E. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

- a) Melakukan koordinasi dengan lintas sektor dalam upaya pembinaan serta pengawasan sarana distribusi Pangan Olahan.
- b) Penyampaian informasi yang merata kepada masyarakat melalui KIE merupakan hal penting yang menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan pemeriksaan produksi.

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel 34 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya TW 1

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	112.263.250	5.714.375	5,09	133,33	75 % (Tidak Efisien)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran adalah efisien dengan tingkat efisiensi 75% dan capaian indikator 133,33%, sedangkan realisasi anggaran masih kecil (kurang dari 100%).

3.1.1.11 Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan. Iklan yang diawasi dilaksanakan melalui tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait. Iklan yang diawasi pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan

Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel dibawah.

Tabel 35 Perbandingan Realisasi “Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan” triwulan I tahun 2025

INDIKATOR KEGIATAN	TW 1 TAHUN 2025		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	82	93,82	114,41	Sangat Baik	

A. **PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN 1 TAHUN 2025**

Pada Triwulan I Tahun 2025 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan sebesar 82%. Persentase realisasi target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 100% dengan memperoleh persentase capaian sebesar 133,33% dan memperoleh kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.

B. **PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2025 DENGAN TRIWULAN SEBELUMNYA**

Realisasi dan capaian triwulan I tahun 2025 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

C. **PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025 DENGAN TARGET TAHUN 2025**

Realisasi Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan triwulan I tahun 2025 telah mencapai target Tahun 2025 dengan kriteria capaian **Melampaui**. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah.

Tabel 36 Perbandingan Realisasi “Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” triwulan I tahun 2025

INDIKATOR KEGIATAN	TW 1 TAHUN 2025		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82	93,82	114,41	Tercapai/ Melampaui	

D. **ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)**

Kebhasilan target ini didukung oleh komitmen petugas untuk melakukan evaluasi dan pelaporan iklan tepat waktu dan sesuai pedoman seperti melakukan koordinasi melalui pengiriman surat kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah tentang waktu tayang iklan dan meminta rekaman iklan yang ditayangkan oleh media penyiaran / TV lokal

E. **ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA**

Melakukan koordinasi melalui pengiriman surat kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah tentang waktu tayang iklan dan meminta rekaman iklan yang ditayangkan oleh media penyiaran / TV local

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel 37 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya TW 1

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	11.580.000	0	0	-	-

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran belum dapat diukur di TW 1 2025.

SASARAN KEGIATAN KE-2: Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 1 (satu) indikator. Berdasarkan perhitungan indikator tersebut, diperoleh hasil capaian sebesar **133,33%** dengan kriteria pencapaian **Tidak Dapat Disimpulkan**. Rincian capaian kinerja sasaran kegiatan ke-2 triwulan I tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 38 CAPAIAN KINERJA SARAN KEGIATAN KE-2 TRIWULAN I TAHUN 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI	
Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	15	20	133,33	Tidak Dapat Disimpulkan	

3.1.2.1 Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana produksi pangan fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar. Sarana pangan fortifikasi yang diperiksa dan

ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sarana produksi pangan fortifikasi yang berada di wilayah kerja UPT yang diperiksa dan ditindaklanjuti berdasarkan regulasi

perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi kesesuaian tindak lanjut serta koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pemeriksaan dan hasil uji sampling produk pangan fortifikasi (jika diperlukan).

Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel dibawah.

Tabel 39 Perbandingan Realisasi “Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” triwulan I tahun 2025

INDIKATOR KEGIATAN	TW 1 TAHUN 2025		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	15	20	133,33	Tidak Dapat Disimpulkan	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN 1 TAHUN 2025

Pada Triwulan I Tahun 2025 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 15%. Persentase realisasi target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 20% dengan memperoleh persentase capaian sebesar 133,33% dan memperoleh kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2025 DENGAN TRIWULAN SEBELUMNYA

Realisasi dan capaian triwulan I tahun 2025 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025 DENGAN TARGET TAHUN 2025

Realisasi Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan I tahun 2025 telah mencapai target Tahun 2025 dengan kriteria capaian **Melampaui**. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah.

Tabel 40 Perbandingan Realisasi “Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” triwulan I tahun 2025

INDIKATOR KEGIATAN	TW 1 TAHUN 2025		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82	93,82	114,41	Tercapai/ Melampaui	

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

Transportasi merupakan kendala utama yang menjadi ganjalan dalam pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi. Sehingga diusahakan adanya proses pengadaan sewa kendaraan untuk dapat digunakan selama satu tahun

E. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Penyampaian informasi yang merata kepada masyarakat melalui KIE merupakan hal penting yang menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan pemeriksaan produksi

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel 41 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya TW 1

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	8.465.000	0	0	133,33	-

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran belum dapat diukur di TW 1 2025. Keterbatasan anggaran menuntut personel untuk lebih kreatif dan menekan pengeluaran dalam transportasi dengan menggunakan transportasi online selama belum mendapat fasilitas sewa mobil

SASARAN KEGIATAN KE-3: Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM. Balai POM di Bogor termasuk kategori laboratorium tingkat 2. SKL laboratorium tingkat 2 terdiri dari 3 (empat) komponen yaitu pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup, Standar Peralatan dan Standar Kompetensi Laboratorium

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 1 (satu) indikator. Berdasarkan perhitungan indikator tersebut, diperoleh hasil capaian sebesar **197,50%** dengan kriteria pencapaian **Tidak Dapat Disimpulkan**. Rincian capaian kinerja sasaran kegiatan ke-3 triwulan I tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 42 CAPAIAN KINERJA SARAN KEGIATAN KE-3 TRIWULAN I TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI	
1	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	4	7,9	197,5	Tidak Dapat Disimpulkan	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN 1 TAHUN 2025

Pada Triwulan I Tahun 2025 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium sebesar 4. Realisasi target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 7,9 dengan memperoleh persentase capaian sebesar 197,50% dan memperoleh kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2025 DENGAN TRIWULAN SEBELUMNYA

Realisasi dan capaian triwulan I tahun 2025 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025 DENGAN TARGET TAHUN 2025

Realisasi Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium triwulan I tahun 2025 telah mencapai target Tahun 2025 dengan kriteria capaian **Melampaui**. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah.

Tabel 43 Perbandingan Realisasi “Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium” triwulan I tahun 2025

INDIKATOR KEGIATAN	TW 1 TAHUN 2025		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	4	7,9	197,5	Tercapai/ Melampaui	

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

Keb keberhasilan peningkatan kinerja diperoleh dari nilai pemenuhan standar peralatan sebesar 40,80 % sehingga nilai pemenuhan SKL Triwulan I mencapai realisasi 6,10 % dengan target nilai SKL Triwulan I adalah 4 %. Maka, nilai pencapaian sasaran (NPS) dari indikator kegiatan Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium adalah 152,5 % dengan Kategori Tercapai/ Melampaui

E. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Adapun pencapaian indikator kegiatan Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah kegiatan pengadaan alat laboratorium tahun 2024. Hal tersebut menyumbang nilai cukup besar dalam penilaian pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium khususnya nilai pemenuhan standar peralatan.

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel 44 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya TW 1

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan	1.835.132.000	0	0	197,5	-

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium					

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran belum dapat diukur di TW 1 2025. Pada umumnya terdapatnya efisiensi penggunaan sumber daya tidak terlalu berpengaruh terhadap pemenuhan Standar Ruang Lingkup pada pemenuhan nilai SKL, karena laboratorium Balai POM di Bogor rata-rata masih mempunyai fasilitas peralatan laboratorium yang sudah didapat tahun 2024.

SASARAN KEGIATAN KE-4: Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE. Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital, dan media luar ruang. Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu:

- Sumber atau Narasumber KIE
- Konten atau Informasi KIE
- Pemahaman Audiens KIE
- Manfaat KIE bagi Audiens KIE

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 4 indikator. Berdasarkan perhitungan ke-empat indikator tersebut, diperoleh Nilai Pencapaian Sasaran sebesar 60,58% dengan kriteria pencapaian **Kurang**. Rincian capaian kinerja sasaran kegiatan ke-4 triwulan I tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel dibawah.

Tabel 45 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-4 TRIWULAN I TAHUN 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI	
Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing	Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah	83,96	85,92	102,33	Sangat Baik	

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI	
wilayah kerja UPT	kerja UPT					
	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	20	10	50	Kurang	
	Jumlah Desa Pangan Aman	25	10	40	Kurang	
	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	20	10	50	Kurang	

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Beberapa jenis Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi: (a) KIE melalui media cetak dan elektronik; (b) KIE langsung ke masyarakat; dan (c) KIE melalui media sosial. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria: (a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE; (b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima; (c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE; (d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan. Pengolahan data kuesioner KIE dilakukan oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan Badan POM yang dilakukan setiap semester. Pengukuran indikator tersebut menggunakan indikator pembentuk indeks efektifitas KIE dengan 4 (empat) aspek KIE yang terdiri dari: (1) Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE; (2) Pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima; (3) Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE; dan (4) Minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan.

3.1.4.1 Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Tabel 46 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT” TRIWULAN I TAHUN 2025

INDIKATOR KINERJA	TW 1 TAHUN 2025		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	83,96	85,92	102,33	Sangat Baik	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN 1 TAHUN 2025

Pada Triwulan I Tahun 2025 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan Tingkat Efektivitas

KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT sebesar 83,96. Realisasi target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 85,92 dengan memperoleh persentase capaian sebesar 102,33% dan memperoleh kriteria **Sangat Baik**.

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2025 DENGAN TRIWULAN SEBELUMNYA

Realisasi dan capaian triwulan I tahun 2025 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025 DENGAN TARGET TAHUN 2025

Realisasi Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT triwulan I tahun 2025 telah mencapai target Tahun 2025 dengan kriteria capaian **Melampaui**. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah.

Tabel 47 Perbandingan Realisasi “Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT” triwulan I tahun 2025

INDIKATOR KEGIATAN	TW 1 TAHUN 2025		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	83,96	85,92	102,33	Tercapai/ Melampaui	

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

Pada triwulan I tahun 2025, nilai pencapaian sasaran indikator kinerja ini telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 102,33 % (Tercapai/ Melampaui), Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran sampai dengan triwulan I tahun 2025 disebabkan antara lain oleh:

1. KIE dilaksanakan secara tatap muka (luring) dengan dengan topik Keamanan Obat dan Makanan, Cek KLIK, BPOM Mobile, AMR, Cegah Stunting dan Kata BPOM pada acara Penyebaran Informasi melalui kegiatan Car Free Day dan Kegiatan Donor Darah.
2. KIE dilaksanakan menghadirkan praktisi yang sesuai di bidangnya dengan topik GROW BPOM series 2: Alternatif pengganti formalin pada tahu dan mi kuning
3. KIE memanfaatkan platform media sosial yang dimiliki oleh Balai POM di Bogor yaitu Instagram, Facebook, Twitter, dan Youtube

Hasil penilaian efektifitas KIE pada kegiatan di atas sebagai berikut:

- Sumber informasi (84,34)
- Konten atau informasi (84,84)
- Pemahaman audiens (77,16)

- Manfaat KIE (76,92)

Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa indeks total efektifitas KIE adalah cukup efektif. Peserta mendapatkan informasi/ materi yang sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta. Namun, perlu adanya penyesuaian tema KIE terhadap peserta baik usia maupun gender, diantaranya materi mengenai kosmetik bisa diberikan ke remaja khususnya perempuan, serta pengemasan materi / bahan informasi dengan bahasa yang disesuaikan dengan audiens.

E. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Pada triwulan I tahun 2025, nilai pencapaian sasaran indikator kinerja ini telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 102,33 % (Tercapai/ Melampaui), program / kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran kegiatan ini adalah:

1. KIE luring / Penyebaran Informasi pada kegiatan Car Free Day (CFD)
2. KIE luring / Penyebaran Informasi pada kegiatan Donor Darah
3. KIE luring GROW BPOM series 2: Alternatif pengganti formalin pada tahu dan mi kuning

Dalam upaya mencapai indikator kinerja efektifitas KIE Obat dan Makanan, masih terdapat kendala yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan KIE, yaitu masih terbatasnya kelompok peserta yang dapat memahami materi KIE sehingga perlu membuat media atau bahan informasi yang lebih mudah untuk dipahami

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel 48 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya TW 1

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1.310.088.000	10.071.500	0,77	102,33	75 % (Tidak Efisien)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran adalah efisien dengan tingkat efisiensi 75% dan capaian indikator 102,33%, sedangkan realisasi anggaran masih kecil (kurang dari 100%).

3.1.4.2 Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah.

- A. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan keamanan pangan terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA.
- B. intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah, Monitoring dan Sertifikasi Sekolah, dan Pengawasan sekolah yang sudah diintervensi.
- C. Kriteria Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan adalah:
 - 1. Memiliki SK Tim dan Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif;
 - 2. Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah
 - 3. Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.

Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan dan perilaku keamanan pangan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.

Apabila seluruh sekolah (dengan kriteria yang telah ditetapkan) pada Kabupaten/Kota yang sudah ditentukan telah selesai di intervensi, maka UPT dapat melakukan intervensi di Kabupaten/Kota lain dengan kriteria sebagai berikut:

- 1. Jika Kab/Kota banyak, maka dipilih yang belum pernah diintervensi sejak 2020-2024.
- 2. Jika Kab/Kota sedikit, maka bisa dilakukan intervensi ulang.
- D. Tahapan kegiatan sebagai berikut:
 - a) Sekolah Full Intervensi:
 - 1. advokasi lintas sektor program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
 - 2. Sosialisasi Keamanan pangan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
 - 3. Bimtek Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah
 - 4. Monitoring dan sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
 - 5. Pengawasan sekolah yang sudah di intervensi Keamanan pangan.
 - b) Sekolah Perluasan: Sosialisasi Keamanan Pangan

Tabel 49 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan”
TRIWULAN I TAHUN 2025

INDIKATOR KINERJA	TW 1 TAHUN 2025		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	20	10	50	Kurang	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN 1 TAHUN 2025

Pada Triwulan I Tahun 2025 *progress* target yang ditetapkan pada indikator kegiatan Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan sebesar 20. Realisasi *progress* target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 10 dengan memperoleh persentase capaian sebesar 50% dan memperoleh kriteria **Kurang**.

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2025 DENGAN TRIWULAN SEBELUMNYA

Realisasi dan capaian triwulan I tahun 2025 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025 DENGAN TARGET TAHUN 2025

Realisasi indikator Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan triwulan I tahun 2025 belum mencapai target Tahun 2025 dengan kriteria capaian **Perlu Upaya Keras**. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah.

Tabel 50 Perbandingan Realisasi “Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan” triwulan I tahun 2025

INDIKATOR KEGIATAN	TW 1 TAHUN 2025		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	100	10	10	Perlu Upaya Keras	

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

Indikator kegiatan persentase jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan masih dalam kriteria perlu upaya keras. Oleh karena itu rekomendasi untuk penyempurnaan capaian pada TW 2 adalah menyelesaikan tahapan yang belum tercapai pada TW 1 ke TW 2. Kegiatan ini belum tercapai dikarenakan adanya masa transisi pada Kepala

Daerah pada Pemerintah Kota tujuan intervensi. Sehingga tahapan PJAS menunggu selesainya masa transisi tersebut.

E. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Dilakukannya audiensi dengan pemda terkait tanpa menunggu audiensi dengan Kepala Daerah tujuan intervensi.

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel 51 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya TW 1

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	4.608.000	1.462.500	31,74	50	92 % (Efisien)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran adalah efisien dengan tingkat efisiensi 92% dan capaian indikator 50%, sedangkan realisasi anggaran masih kecil (kurang dari 100%). Pada target PJAS TW 1 terdapatnya efisiensi penggunaan sumber daya tidak terlalu berpengaruh terhadap pemenuhan karena pada pelaksanaanya, audiensi tetap berjalan meskipun menggunakan media daring berupa zoom meeting.

3.1.4.3 Jumlah Desa Pangan Aman

Desa pangan aman merupakan aksi nasional yang dilaksanakan untuk memberikan intervensi keamanan pangan ke desa/kelurahan dengan tahapan program sebagai berikut :

- 1. Advokasi Kelembagaan Desa
- 2. Pengadaan Produk Informasi Keamanan Pangan
- 3. Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa
- 4. Bimbingan Teknis (Bimtek) Komunitas
- 5. Fasilitasi Keamanan Pangan
- 6. Pengawasan Keamanan Pangan pre dan post intervensi
- 7. Monitoring dan evaluasi
- 8. Lomba Desa

Program Desa Pangan aman ini merupakan pertama kalinya dilakukan oleh BPOM di Bogor. Target Desa Pangan Aman tahun 2024 adalah 1 Desa/Kelurahan yaitu Kelurahan Gunung Batu di Kota Bogor. Seluruh tahapan intervensi program Desa Pangan Aman telah dilaksanakan mulai dari advokasi lintas sektor sampai dengan pengajuan mengikuti lomba Pangan Aman.

Program Desa Pangan aman yang dilakukan oleh Balai POM di Bogor tergolong berhasil. Keberhasilan program ini diukur dengan terpenuhinya beberapa indikator yaitu:

- 1. Kader Keamanan Pangan Desa yang aktif
- 2. Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
- 3. Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri Persentase progres capaian jumlah Desa Pangan Aman telah tercapai 100%

Tabel 52 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Jumlah Desa Pangan Aman” TRIWULAN I TAHUN 2025

INDIKATOR KINERJA	TW 1 TAHUN 2025		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Jumlah Desa Pangan Aman	25	10	40	Kurang	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN 1 TAHUN 2025

Pada Triwulan I Tahun 2025 *progress* target yang ditetapkan pada indikator kegiatan Jumlah Desa Pangan Aman sebesar 25. Realisasi *progress* target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 10 dengan memperoleh persentase capaian sebesar 40% dan memperoleh kriteria **Kurang**.

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2025 DENGAN TRIWULAN SEBELUMNYA

Realisasi dan capaian triwulan I tahun 2025 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025 DENGAN TARGET TAHUN 2025

Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman triwulan I tahun 2025 belum mencapai target Tahun 2025 dengan kriteria capaian **Perlu Upaya Keras**. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah.

Tabel 53 Perbandingan Realisasi “Jumlah Desa Pangan Aman” triwulan I tahun 2025

INDIKATOR KEGIATAN	TW 1 TAHUN 2025		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Jumlah Desa Pangan Aman	100	10	10	Perlu Upaya Keras	

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

Indikator kegiatan persentase jumlah desa pangan aman masih dalam kriteria perlu upaya keras. Oleh karena itu rekomendasi untuk penyempurnaan capaian pada TW 2 adalah menyelesaikan tahapan yang belum tercapai pada TW 1 ke TW 2. Kegiatan ini belum tercapai dikarenakan adanya masa transisi pada Kepala Daerah pada Pemerintah Kota tujuan intervensi. Sehingga tahapan Desa Pangan Aman menunggu selesainya masa transisi tersebut

E. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Pada target tahapan Desa Pangan Aman TW 1 terdapatnya efisiensi penggunaan sumber daya tidak terlalu berpengaruh terhadap pemenuhan karena pada pelaksanaanya, audiensi tetap berjalan meskipun menggunakan media daring berupa zoom meeting

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel 54 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya TW 1

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Jumlah Desa Pangan Aman	8.192.000	0	0	40	-

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran belum dapat diukur di TW 1 2025. Pada target Desa Pangan Aman TW 1 terdapatnya efisiensi penggunaan sumber daya tidak terlalu berpengaruh terhadap pemenuhan karena pada pelaksanaanya, audiensi tetap berjalan meskipun menggunakan media daring berupa zoom meeting

3.1.4.4 Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang di dalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari para pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar baik dari sisi suply maupun demand. Tahapan dalam program pasar aman berbasis komunitas ini antara lain adalah sebagai berikut:

- 1. Survei pasar
- 2. Advokasi lintas sektor
- 3. Bimtek petugas/pengelola pasar
- 4. Penyuluhan Pedagang pasar
- 5. Kampanye Keamanan pangan di pasar
- 6. Sampling dan pengujian tahap 1 dan 2

Target jumlah pasar yang diintervensi oleh Balai POM di Bogor pada tahun 2025 sebanyak 1 pasar. Indikator keberhasilan pasar pangan aman berbasis komunitas diukur dengan antara lain:

- 1. Pembentukan kader pasar yang mampu melakukan pengawasan mandiri terhadap bahan berbahaya maupun produk pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya melalui sampling dan pengujian sampel dengan menggunakan test kit serta memberikan KIE kepada komunitas pasar

Tersedia data hasil sampling dan pengujian di pasar yang menjadi target intervensi sebagai pasar pangan aman berbasis komunitas dan tersedia di aplikasi sipaman

Tabel 55 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas” TRIWULAN I TAHUN 2025

INDIKATOR KINERJA	TW 1 TAHUN 2025		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	20	10	50	Kurang	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN 1 TAHUN 2025

Pada Triwulan I Tahun 2025 *progress* target yang ditetapkan pada indikator kegiatan Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas sebesar 20. Realisasi *progress* target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 10 dengan memperoleh persentase capaian sebesar 50% dan memperoleh kriteria **Kurang**.

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2025 DENGAN TRIWULAN SEBELUMNYA

Realisasi dan capaian triwulan I tahun 2025 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025 DENGAN TARGET TAHUN 2025

Realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas triwulan I tahun 2025 belum mencapai target Tahun 2025 dengan kriteria capaian **Perlu Upaya Keras**. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah.

Tabel 56 Perbandingan Realisasi “Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas” triwulan I tahun 2025

INDIKATOR KEGIATAN	TW 1 TAHUN 2025		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	100	10	10	Perlu Upaya Keras	

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

Indikator kegiatan persentase jumlah Pasar Pangan Berbasis Komunitas masih dalam kriteria perlu upaya keras. Oleh karena itu rekomendasi untuk penyempurnaan capaian pada TW 2 adalah menyelesaikan tahapan yang belum tercapai pada TW 1 ke TW 2. Kegiatan ini belum tercapai dikarenakan adanya masa transisi pada Kepala Daerah pada Pemerintah Kota tujuan intervensi. Sehingga tahapan Desa Pangan Aman menunggu selesainya masa transisi tersebut.

E. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Pada target tahapan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas target TW 1 terdapatnya efisiensi penggunaan sumber daya tidak terlalu berpengaruh terhadap pemenuhan karena pada pelaksanaanya, audiensi tetap berjalan meskipun menggunakan media daring berupa zoom meeting

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel 57 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya TW 1

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1.200.000	0	0	50	-

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran belum dapat diukur di TW 1 2025. Pada tahapan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas target TW 1 terdapatnya efisiensi penggunaan sumber daya tidak terlalu berpengaruh terhadap pemenuhan karena pada pelaksanaanya, audiensi tetap berjalan meskipun menggunakan media daring berupa zoom meeting

SASARAN KEGIATAN KE-5: Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

Tabel 58 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-5 TRIWULAN I TAHUN 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI	
Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	20	11,67	58,35	Kurang	

Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB = (A + B + C)/3

A = Jumlah UMK Pangan Olahan yang memperoleh IP-CPPOB Jumlah UMK Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan x 100%

B = jumlah rekomendasi sertifikat CPOTB Bertahap Jumlah UMKM OBA yang didampingi pada tahun berjalan x 100%

C = Jumlah rekomendasi SPA CPKB Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan x 100%

Catatan: Jumlah UMKM yang didampingi minimal sesuai target pada DIPA

A. Ruang Lingkup UMKM:

1. UMK pada pangan olahan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:

- a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
- b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2. Ruang Lingkup UMKM OBA dan Kosmetik:

- a. UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT meliputi:

- Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan
 - Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.
- b. UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

B. UMKM yang memenuhi standar adalah:

- UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK;
- UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3);
- UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB.

C. Kriteria UMKM yang didampingi:

Untuk UMK Pangan Olahan :

- a. UMK yang didampingi mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan.
- b. UMK dihitung berdasarkan UMK yang difasilitasi BPOM melalui UPT BPOM selama tahun berjalan.

Sebagai informasi, tahapan Pendampingan UMK Pangan Olahan yang dilakukan di UPT meliputi : KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan, Penetapan target UMK Pangan Olahan, Bimtek CPPOB, Fasilitasi Pendampingan UMK Pangan Olahan, penerbitan IP CPPOB, serta Monev dan pelaporan.

Untuk UMKM OBA:

- 1) Usaha yang sudah mempunyai produk obat bahan alam dan/atau obat kuasi namun belum memiliki izin edar;
- 2) *Start-up* yang akan memproduksi obat bahan alam dan/atau obat kuasi, khususnya *start-up* yang telah mendapatkan pendampingan dari program Dana Alokasi Khusus (DAK);
- 3) UMKM yang sudah mempunyai nomor izin edar PIRT dan harus beralih ke obat bahan alam;

- 4) UMKM Obat Bahan Alam yang sudah didampingi namun belum memiliki Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
- 5) UMKM Obat Bahan Alam yang akan melakukan Sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap ke tahap selanjutnya (Tahap 2 dan/ atau Tahap 3); dan
- 6) UMKM Obat Bahan Alam yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan Start-up / UMKM Obat Bahan Alam yang akan didampingi memiliki kriteria sebagai berikut :

- Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 21022 dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) setempat dan akan mengajukan sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
- Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan digunakan sebagai fasilitas produksi; dan
- Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap.

Untuk UMKM Kosmetik:

- 1) UMKM yang memproduksi kosmetik;
- 2) UMKM kosmetik yang masih merintis dalam pemenuhan aspek CPKB (*start-up*);
- 3) UMKM kosmetik yang sudah didampingi namun belum memiliki SPA CPKB/ Sertifikat CPKB; dan
- 4) UMKM kosmetik yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan UMKM kosmetik yang akan didampingi pada tahun berjalan, dengan salah satu kriteria sebagai berikut :

- Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 20232 dari PTSP setempat dan akan mengajukan sertifikasi CPKB;
- Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan dijadikan fasilitas produksi; dan
- Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPKB.

.

Tabel 59 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan” TRIWULAN I Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI	
Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	20	11,67	58,35	Kurang	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN 1 TAHUN 2025

Pada Triwulan I Tahun 2025 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan sebesar 20%. Realisasi target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 11,67% dengan memperoleh persentase capaian sebesar 58,35% dan memperoleh kriteria **Kurang**.

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2025 DENGAN TRIWULAN SEBELUMNYA

Realisasi dan capaian triwulan I tahun 2025 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025 DENGAN TARGET TAHUN 2025

Realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan triwulan I tahun 2025 belum mencapai target Tahun 2025 dengan kriteria capaian **Perlu Upaya Keras**. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah.

Tabel 60 Perbandingan Realisasi “Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan” triwulan I tahun 2025

INDIKATOR KEGIATAN	TW 1 TAHUN 2025		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	91	11,67	12,82	Perlu Upaya Keras	

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

Pada Triwulan I tahun 2025, persentase capaian Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan belum memenuhi target. Target yang ditetapkan sebesar 20%, sedangkan persentase realisasi sebesar 11,67%. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan manual IKU pada awal tahun. Khusus untuk pangan olahan dipersyaratkan dilakukan sosialisasi terkait keamanan pangan baru selanjutnya dilakukan penetapan target UMK pangan. Sosialisasi dilaksanakan pada Januari 2025 namun pada saat sosialisasi IPCPPOB hanya dihadiri oleh sedikit pelaku usaha. Pelaksanaan pendampingan juga mengalami kendala dikarenakan efisiensi anggaran khususnya untuk anggaran QDG. Anggaran terkait koordinasi dan biaya paket meeting dalam rangka pelaksanaan bimtek mengalami efisiensi, sedangkan Balai POM di Bogor belum memiliki tempat yang memadai untuk menampung peserta UMK. Menindaklanjuti kendala tersebut, kami berinovasi untuk melakukan berkolaborasi dengan OPD untuk pelaksanaan bimtek. Koordinasi dengan OPD belum terlaksana hingga akhir Maret. sehingga pada akhir Maret, baru terlaksana penetapan UMK. Bimbingan teknis akan dilaksanakan di bulan April -Mei. Rekomendasi perbaikan untuk triwulan selanjutnya adalah Balai POM di Bogor akan melakukan pemanggilan kepada pelaku usaha yang belum memiliki IPCPPOB, melakukan kunjungan koordinasi dengan dinas koperasi dan UMK Kota Depok, dan pelaksanaan Bimtek UMK Kosmetik, Obat Tradisional, dan Pangan

E. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Program atau Kegiatan yang dapat menunjang agar pencapaian indikator kinerja persentase capaian Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan belum memenuhi target adalah berkolaborasi dengan OPD untuk pelaksanaan bimtek serta pelaksanaan bimtek pendampingan UMK Obat tradisional, Kosmetik, dan pangan olahan

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel 61 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya TW 1

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	8.630.000	0	0	58,35	-

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran belum dapat diukur di TW 1 2025.

SASARAN KEGIATAN KE-6: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 1 indikator. Berdasarkan perhitungan indikator tersebut, diperoleh Nilai Pencapaian Sasaran sebesar 191,67% dengan kriteria pencapaian **Tidak Dapat Disimpulkan**. Rincian capaian kinerja sasaran kegiatan ke-6 triwulan I tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel dibawah:

Tabel 62 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-6 TRIWULAN I TAHUN 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI	
Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT	15	28,75	191,67	Tidak Dapat Disimpulkan	

3.1.6.1 Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT

Pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:
((Jumlah perkara SPDP x 0.15 + Jumlah perkara Tahap I x 0.55 + Jumlah perkara P21 x 0.85 + Jumlah perkara Tahap II x 1) / Jumlah perkara) x 100%))

Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Capaian dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:

- 1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%;
- 2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40%;
- 3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%; dan
- 4) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15%.

Setelah itu, dilakukan pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:

$$= ((\text{Jumlah perkara SPDP} \times 0.15 + \text{Jumlah perkara Tahap I} \times 0.55 + \text{Jumlah perkara P21} \times 0.85 + \text{Jumlah perkara Tahap II} \times 1) / \text{Jumlah target perkara}) \times 100\%$$

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai oleh perkara SP3 tersebut.

Perkara carryover yang dihitung menjadi capaian perkara merupakan seluruh perkara yang belum tahap 2 sampai dengan tahun N-1. Perkara carry over dikecualikan apabila telah ditetapkan DPO atau dalam proses penetapan DPO atau sudah ditetapkan SP3.

Perkara dengan tersangka yang sudah di tetapkan DPO, tetap dilaporkan dalam laporan kemajuan penyidikan yang dilaporkan melalui Aplikasi Dashboard Penindakan atau laporan kemajuan penyidikan *hardcopy*

Tabel 63 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT” Triwulan I Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI	
Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT	15	28,75	191,67	Tidak Dapat Disimpulkan	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN 1 TAHUN 2025

Pada Triwulan I Tahun 2025 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT sebesar 15%. Realisasi target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 28,75% dengan memperoleh persentase capaian sebesar 191,67% dan memperoleh kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2025 DENGAN TRIWULAN SEBELUMNYA

Realisasi dan capaian triwulan I tahun 2025 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025 DENGAN TARGET TAHUN 2025

Realisasi Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT triwulan I tahun 2025 belum mencapai target Tahun 2025 dengan kriteria capaian **Perlu Upaya Keras**. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah.

Tabel 64 Perbandingan Realisasi “Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT” triwulan I tahun 2025

INDIKATOR KEGIATAN	TW 1 TAHUN 2025		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT	80	28,75	35,93	Perlu Upaya Keras	

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

Tercapainya target pada awal TW 1 ini disebabkan petugas yang aktif dan pelaku usaha yang kooperatif serta kolaborasi dengan instansi lain saat bertugas

E. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Kerjasama dan koordinasi dengan instansi lain sangat berpengaruh terutama pada saat penindakan. Menyusun strategi untuk mengoptimalkan capaian di TW berikutnya dengan adanya relaksasi anggaran terkait penegakan hukum di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan.

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel 65 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya TW 1

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT	218.924.000	6.791.500	3,10	191,67	75 % (Tidak Efisien)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran adalah efisien dengan tingkat efisiensi 75% dan capaian indikator 191,67%, sedangkan realisasi anggaran masih kecil (kurang dari 100%). Penggunaan dana yang tersedia setelah efisiensi digunakan semaksimal mungkin untuk mendukung operasional dan kegiatan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT.

SASARAN KEGIATAN KE-7: Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Tabel 66 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-7 Triwulan I Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI	
Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase	50	50	100	Baik	
	Laporan Analisis					
	Kejahatan					
	Sediaan Farmasi					
	dan Pangan					
	Olahan yang diselesaikan					
	sesuai standar					

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM;
- b. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari :
 - 1) Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (**1 laporan dilaporkan tiap tahun**).
 - 2) Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (**1 laporan dilaporkan tiap tahun**).

Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai:

- a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%)

- b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%)
- c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%)

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN 1 TAHUN 2025

Pada Triwulan I Tahun 2025 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar sebesar 50%. Realisasi target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 100% dengan memperoleh persentase capaian sebesar 100% dan memperoleh kriteria **Baik**.

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2025 DENGAN TRIWULAN SEBELUMNYA

Realisasi dan capaian triwulan I tahun 2025 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025 DENGAN TARGET TAHUN 2025

Realisasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar triwulan I tahun 2025 belum berhasil mencapai target Tahun 2025 dengan kriteria capaian **Perlu Upaya Keras**. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah

Tabel 67 Perbandingan Realisasi “Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT” triwulan I tahun 2025

INDIKATOR KEGIATAN	TW 1 TAHUN 2025		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	50	55,55	Perlu Upaya Keras	

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

Hasil dari indikator ini didapatkan Perlu Upaya Keras dikarenakan beberapa hal: kekurangan dukungan data dan informasi yang akurat, lengkap dan terkini, kekurangan kemampuan jumlah SDM dalam pengolahan data dan interpretasi terhadap hasil analisis yang diperoleh,

dan penggunaan sistem informasi pada dashboard penindakan dalam mendukung visualisasi tren kejahatan

E. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Upaya untuk meningkatkan keberhasilan antara lain:

- a) Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) terkait teknik analisis maupun penggunaan alsus (alat khusus).
- b) Meningkatkan koordinasi secara terus menerus dengan instansi lainnya seperti Kepolisian, Kejaksaan Tinggi dan Dinas Kesehatan
- c) Melakukan analisis tren dan pola kejahatan serta pemetaan wilayah rawan dan risiko produk secara lebih komprehensif.

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel 68 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya TW 1

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	1.470.000	121.000	8,23	100	75 % (Tidak Efisien)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran adalah efisien dengan tingkat efisiensi 75% dan capaian indikator 100%, sedangkan realisasi anggaran masih kecil (kurang dari 100%).

SASARAN KEGIATAN KE-8 : Layanan Publik UPT yang prima

Tabel 69 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-8 Triwulan I Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	
Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,2	-	-	-	-

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
- 2) Profesionalitas SDM (25%);
- 3) Sarana Prasarana (18%);
- 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
- 5) Konsultasi dan Pengaduan (10%);
- 6) Inovasi (12%)

Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi. Nilai Indeks Pelayanan Publik:

75% Nilai Indeks F02 + 25% Nilai Indeks F03

. Kategori nilai:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup <i>(Dengan Catatan)</i>
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik <i>(Dengan Catatan)</i>
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

A.PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN 1 TAHUN 2025

Pada triwulan I tahun 2025 belum diperoleh nilai Indeks Pelayanan Publik UPT. Nilai akan diperoleh pada akhir tahun 2025.

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2025 DENGAN TRIWULAN SEBELUMNYA

Realisasi dan capaian triwulan I tahun 2025 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025
DENGAN TARGET TAHUN 2025

Belum tersedia realisasi Indeks Pelayanan Publik UPT pada triwulan I tahun 2025. Realisasi akan diperoleh pada akhir tahun 2025. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah.

Tabel 70 Perbandingan Realisasi “Indeks Pelayanan Publik UPT” triwulan I tahun 2025

INDIKATOR KEGIATAN	TW 1 TAHUN 2025		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Indeks Pelayanan Publik UPT	4,2	-	-	-	-

SASARAN KEGIATAN KE-9 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan Unit Organisasi yang optimal

Tabel 71 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-9 TRIWULAN I TAHUN 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	
Terwujudnya tata kelola pemerintahan Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	77	-	-	-	-
	Nilai AKIP UPT	79,5	-	-	-	-
	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	4	-	-	-	-
	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,6	-	-	-	-

3.1.9.1 Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.

Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM bertujuan untuk:

- 1) memastikan bahwa pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah berjalan sesuai yang diharapkan
- 2) menjadi dasar penetapan dan pengajuan unit WBK/WBBM

Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan *self-assessment* dan reviu oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I

Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua komponen) yaitu

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	BOBOT
1	Manajemen Perubahan	8%
2	Penataan Tatalaksana	7%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

No	KOMPONEN HASIL	BOBOT
1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	22,5 %
2	Pelayanan Publik yang prima	17,5 %

Tabel 72 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM” TRIWULAN I TAHUN 2025

INDIKATOR KINERJA	TW I TAHUN 2025		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KRITERIA	
	TARGET	REALISASI			
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	77	-	-	-	-

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN 1 TAHUN 2025

Pada triwulan I tahun 2025 belum diperoleh Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM. Nilai akan diperoleh pada akhir tahun 2025.

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2025 DENGAN TRIWULAN SEBELUMNYA

Realisasi dan capaian triwulan I tahun 2025 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025 DENGAN TARGET TAHUN 2025

Belum tersedia realisasi Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM pada triwulan I tahun 2025. Realisasi akan diperoleh pada akhir tahun 2025. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah.

Tabel 73 Perbandingan Realisasi “Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM” triwulan I tahun 2025

INDIKATOR KEGIATAN	TW 1 TAHUN 2025		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	77	-	-	-	-

3.1.9.2 Nilai AKIP UPT

Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM.

Penjumlahan 5 (lima) komponen penilaian AKIP, yaitu:

- (1) Perencanaan Kinerja;
- (2) Pengukuran Kinerja;
- (3) Pelaporan Kinerja;
- (4) Evaluasi Kinerja Internal;
- (5) Capaian Kinerja.

Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	24
2	Pengukuran Kinerja	24
3	Pelaporan Kinerja	12
4	Evaluasi Kinerja Internal	20
5	Capaian Kinerja	20

	Nilai Evaluasi	100
--	-----------------------	------------

Predikat nilai AKIP terdiri dari:

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan. Telah terwujud <i>good governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh level. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis, adaptif dan efisiensi (<i>Reform</i>).
2	A	>80-90	Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
3	BB	>70-80	Sangat Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
4	B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada Satuan Kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
5	CC	>50-60	Cukup (memadai). Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja.
6	C	>30-50	Kurang. Sistem dan tatatan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.
7	D	0-30	Sangat Kurang. Sistem dan tatatan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar khususnya dalam implementasi SAKIP.

Tabel 74 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Nilai AKIP UPT” TRIWULAN I TAHUN 2025

INDIKATOR KINERJA	TW I TAHUN 2025		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KRITERIA	
	TARGET	REALISASI			
Nilai AKIP UPT	79,5	-	-	-	-

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN 1 TAHUN 2025

Pada triwulan I tahun 2025 belum diperoleh Nilai AKIP UPT. Nilai akan diperoleh pada akhir tahun 2025.

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2025 DENGAN TRIWULAN SEBELUMNYA

Realisasi dan capaian triwulan I tahun 2025 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025 DENGAN TARGET TAHUN 2025

Belum tersedia realisasi Nilai AKIP UPT pada triwulan I tahun 2025. Realisasi akan diperoleh pada akhir tahun 2025. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah.

Tabel 75 Perbandingan Realisasi “Nilai AKIP UPT” triwulan I tahun 2025

INDIKATOR KEGIATAN	TW 1 TAHUN 2025		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Nilai AKIP UPT	79,5	-	-	-	-

3.1.9.3 Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

Nilai Kinerja Anggaran =
 (Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%)
 Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran

Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA (bobot 10%)
2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
7. Capaian Output (bobot 25%)
8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran.

Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:

1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)
2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

Tabel 76 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM” TRIWULAN I TAHUN 2025

INDIKATOR KINERJA	TW I TAHUN 2025		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KRITERIA	
	TARGET	REALISASI			
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	4	-	-	-	-

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN 1 TAHUN 2025

Pada triwulan I tahun 2025 belum diperoleh Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM. Nilai akan diperoleh pada akhir tahun 2025.

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2025 DENGAN TRIWULAN SEBELUMNYA

Realisasi dan capaian triwulan I tahun 2025 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025 DENGAN TARGET TAHUN 2025

Belum tersedia realisasi Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM pada triwulan I tahun 2025. Realisasi akan diperoleh pada akhir tahun 2025. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah.

Tabel 77 Perbandingan Realisasi “Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM” triwulan I tahun 2025

INDIKATOR KEGIATAN	TW 1 TAHUN 2025		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	4	-	-	-	-

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM akan diperoleh pada akhir tahun, namun setiap triwulan nilai NKA dapat dipantau pada aplikasi OMSPAN dan SMART DJA, nilai NKA TW 1 Balai POM di Bogor yairtu sebesar **80,39** , untuk nilai TW 1 masih berada pada skala 4 yaitu range 80,01-90 sesuai dengan target Balai POM di Bogor, keberhasilan tersebut dikarenakan untuk Nilai IKPA pada TW 1 terdapat penyesuaian dimana semua indikator mendapat nilai 100, selain itu realisasi capaian output sesuai dengan target yang telah ditetapkan. untuk Triwulan selanjutnya Balai POM di Bogor akan selalu memonitoring setiap indikator IKPA terutama Rencana Penarikan Dana dan Realisasi Capaian Output.

E. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Kebhasilan nilai NKA Triwulan 1 pada Balai POM di Bogor dikarenakan selalu dilakukan rapat monitoring terhadap nilai Indikator IKPA terutama Rencana Penarikan dana dan Realisasi

Capaian Output setiap bulan

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu sasaran kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Karena masih berada dalam skala 4 sesuai dengan range target maka dapat disimpulkan penggunaan sumber yang terbatas bisa menjaga anggaran tetap efisien.

3.1.9.4 Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran} = (\text{Nilai EKA} \times 50\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 50\%)$$

Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran

Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

9. Revisi DIPA (bobot 10%)
10. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
11. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
12. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
13. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
14. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
15. Capaian Output (bobot 25%)
16. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran.

Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:

3. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)

4. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

Tabel 78 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM” TRIWULAN I TAHUN 2025

INDIKATOR KINERJA	TW I TAHUN 2025		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KRITERIA	
	TARGET	REALISASI			
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	4	-	-	-	-

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN 1 TAHUN 2025

Pada triwulan I tahun 2025 belum diperoleh Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM. Nilai akan diperoleh pada akhir tahun 2025.

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2025 DENGAN TRIWULAN SEBELUMNYA

Realisasi dan capaian triwulan I tahun 2025 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025 DENGAN TARGET TAHUN 2025

Belum tersedia realisasi Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM pada triwulan I tahun 2025. Realisasi akan diperoleh pada akhir tahun 2025. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah.

Tabel 79 Perbandingan Realisasi “Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM” triwulan I tahun 2025

INDIKATOR KEGIATAN	TW 1 TAHUN 2025		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	4	-	-	-	-

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

Jika targetnya tidak tercapai, maka yang dinarasikan adalah analisis penyebab kegagalan Identifikasi resiko telah dilakukan namun untuk menggali akar permasalahan diperlukan langkah yang kompleks

E. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN
ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Untuk membangun kesadaran risiko pada setiap staf makan perlu diadakan kegiatan untuk meningkatkan taraf kesadaran dalam menjalankan suatu resiko

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Pelatihan dapat digunakan pada TW ini dengan melakukan pemningkatan pengetahuan resiko menlalui Pelatihan 2 hari

3.2 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI
SEBELUMNYA

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan I Tahun 2025

Tabel 80 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan I Tahun 2025

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomen dasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeli ne	
1	Pengawas an dan Pengendal ian Produk	Pengawasan iklan pada media penyiaran / TV lokal susah ditemukan.	Melakukan koordinasi melalui pengiriman surat kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah tentang waktu tayang iklan dan meminta rekaman iklan yang ditayangkan oleh media penyiaran / TV lokal.	Minggu III April.	Dilakukan koordinasi dengan Balai Besar POM di Bandung sebagai Balai Penguji dengan output penyesuaian Renlak dan jadwal pelaksanaan sampling, sehingga pelaksanaan Pengujian bisa dilakukan bersamaan untuk menghemat Reagensia.		Minggu III April.	Belum selesai
2	Meningkat nya efektivitas pengawas an Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Jumlah armada transportasi tidak cukup dan tidak memadai untuk melakukan pemeriksaa n ke beberapa titik dengan akses lokasi yang sempit	Menambah armada transportasi dinas untuk disewa - Berkoordinasi dengan fungsi lain untuk dapat join kendaraan. - Mengguna kan jasa ojol.	1 bulan	Sewa kendaraan	-	April	Sudah proses
3	Meningkat nya pendampi ngan UMKM dalam pemenuha n standar keamanan dan mutu	Terdapat perubaha n tahapan dan waktu untuk manual iku khusus Pangan	Akan melaksanak an penetapan target untuk pendamping an UMK Pangan Olahan pada Maret 2025 melibatkan	Maret 2025	Akan melakukan kunjungan koordinasi dengan dinas koperasi dan UMK Kota Depok		Maret	Selesai

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomen dasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeli ne	
			usulan stake holder					
		Pada saat sosialisasi IPCPPOB hanya diikuti sedikit pelaku usaha	Akan dilaksanaka n sosialisasi kembali terkait IP CPPOB dan keamanan pangan	Maret 2025	Pelaksanaa n sosialisasi IP CPPOB		Maret	Selesai (ikut pusat)
4	Meningka tnya Efektivita s KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	1.Kegiatan KIE yang terbatas karena efisiensi anggaran 2.Bahan informasi yang terbatas, sisa anggaran th 2024 3.Aplikasi utk mengukur efektifitas KIE masih manual, masih pengemba ngan oleh Pusat dengan tools baru 4.Meningkat kan monev penyampa ian informasi melalui media sosial dan subsite 5.Membagi jadwal KIE per triwulan 3.Meningkat kan kompeten si SDM	1.Pelaksana an kie secara daring atau sharing cost 2.Pengajuan ke BBPOM di Bandung 3.done 4.done 5.done 6.Pelatihan	April 2025	3,4,5	1, 2, 6	April 2025	Sedang proses
5	Terlaksan any Penindaka n Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT.	Belum ada kepastian terkait penetapan target output perkara termasuk carry overnya pada tahun 2025 sehingga perhitunga n capaian belum dapat dipastikan						

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomen dasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeli ne	
6	Terlaksan anya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT		- Jika target output direvisi menjadi 1 perkara dan 0 carry over maka proses perkara yang berjalan sudah memenuhi target jika sampai tahap 2 - Jika target output tidak ada revisi maka menunggu pembukaan blokir anggaran untuk dapat memenuhi target	April 2025	- Membuat surat permohonan bantuan pendalaman informasi kepada direktorat intelijen dan ditembusk an ke direktorat penyidikan dan BBPOM Bandung terkait keberadaa n saksi karyawan pada kasus carry over - Koordinasi dengan BPOM Pusat mengenai kepastian target output		April 2025	Sedang proses
6	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratoriu m	Ketersedi an sampel verifikasi - > dimulai April 2025 saat inspeksi sarana pemerinta h	- Koordin asi	April 2025	1)Koordinasi terkait sampel verifikasi dengan Katim Pemeriksaan 2)dimulainya pembelian alat lab paling lambat s.d TW4 -		April 2025	Sedang proses
7	Nilai Pembangu nan ZI UPT Badan POM.	Belum dilakukan input	- Membu at lembar kerja LKe	April 2025	3)Melakukan proses penginputan LKE Zi dan pembahasan s.d Triwulan II Tahun 2025 (bulan April 2025).		April 2025	Selesai
8	Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP) UPT Badan POM		-	April 2025	1. Telah dilakukan penyusunan Laptah dan Lapkin Tahunan 2024. 2. Mela kukan pembahasan dan finalisasi		April 2025	Selesai

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomen dasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeli ne	
					perencanaan / Renstra tahun 2025-2029. 3. Meny iapkan tindak lanjut hasil SAKIP tahun 2024. 4)			
9	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) UPT Badan POM.	Terdapat blockir anggaran karena adanya kebijakan nasional untuk efisiensi, sehingga dilakukan penyesuai an kegiatan.	Mengajukan usulan penambahan anggaran ke Biro Perencanaan dan Keuangan (April 2025). Rekon kegiatan tiap fungsi per triwulan. - Penyes uaian RPD					
10	Indeks Manajeme n Risiko UPT Badan POM.		Menyiapkan tindak lanjut rekomendasi Inspektorat atas hasil Manajemen Risiko tahun 2024.					

3.3 REALISASI ANGGARAN

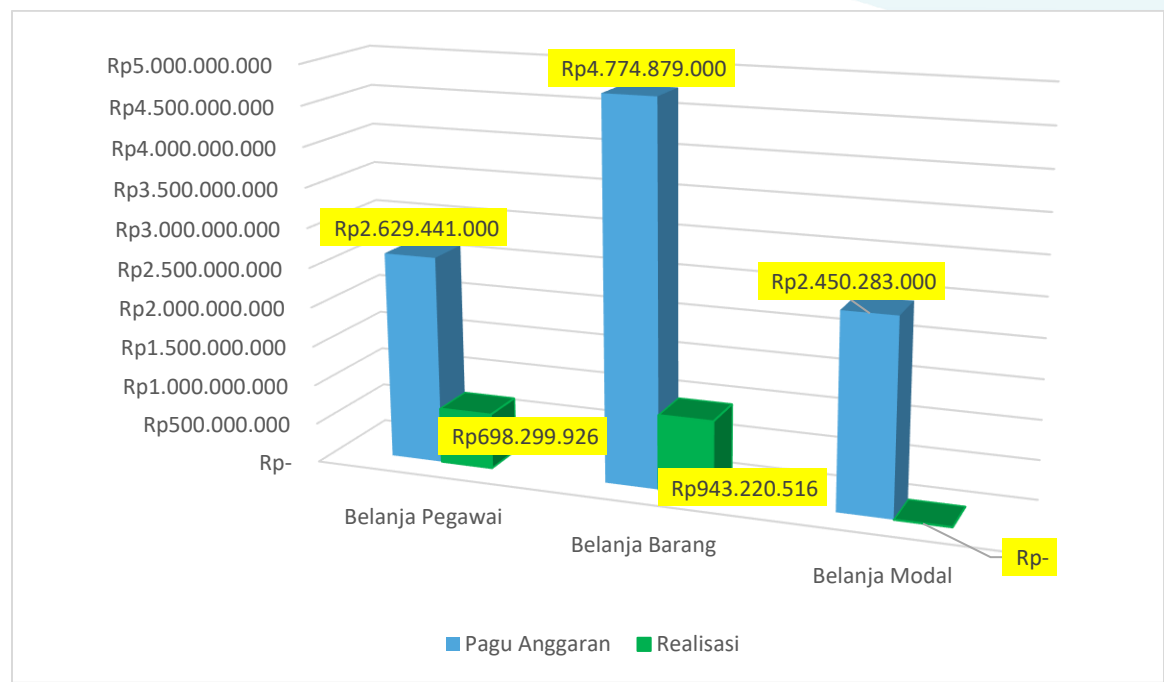
3.3.1 Realisasi anggaran triwulan I tahun 2025

Pada triwulan I tahun 2025 anggaran Balai POM di Bogor sebesar Rp9,854,603,000 (Sembilan Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tiga Rupiah), dengan realisasi sebesar Rp1,641,520,442 (Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) sehingga persentase capaian realisasi sebesar 16,66%. Perincian alokasi anggaran dan realisasinya pada triwulan I tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 81 RINCIAN REALISASI ANGGARAN BALAI POM DI BOGOR TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	%
1.	Belanja Pegawai	Rp 2,629,441,000	Rp 698,299,926	26.56
2.	Belanja Barang	Rp 4,774,879,000	Rp 943,220,516	19.75
3.	Belanja Modal	Rp 2,450,283,000	Rp 0	0
JUMLAH		Rp 9,854,603,000	Rp 1,641,520,442	16.66

Perbandingan komponen serapan anggaran pada triwulan I tahun 2025 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4 Rincian Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Triwulan I Tahun 2025

3.3.2 Realisasi kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran

Realisasi kinerja pada Balai POM di Bogor triwulan I tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi anggaran ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 82 Rincian Realisasi kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran triwulan I 2025

No	Indikator Kinerja	Volume			Anggaran		
		T	R	%	Pagu	Realisasi	%
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82,5	97,16	117,77	21.410.000	6.819.902	31,85
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	-	-	900.000	0	0
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	80	106,67	6.119.840	4.691.356	76,66
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	-	-	22.452.650	1.142.875	5,09
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	85	113,33	532.160	407.944	76,66
6	Persentase keputusan/rekomendasi	88	158,06	179,61	227.499.800	12.206.150	5,37

No	Indikator Kinerja	Volume			Anggaran		
		T	R	%	Pagu	Realisasi	%
	hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder						
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	100	133,33	227.499.800	12.206.150	5,37
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	65	100	153,85	227.499.800	12.206.150	5,37
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,5	70	77,35	112.263.250	5.714.375	5,09
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	100	133,33	112.263.250	5.714.375	5,09
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	82	93,82	114,41	11.580.000	0	0
12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	15	20	133,33	8.465.000	0	0
13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	4	7,9	197,5	1.835.132.000	0	0
14	Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	83,96	85,92	102,33	1.310.088.000	10.071.500	0,77

No	Indikator Kinerja	Volume			Anggaran		
		T	R	%	Pagu	Realisasi	%
15	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	20	10	50	4.608.000	1.462.500	31,74
16	Jumlah Desa Pangan Aman	25	10	40	8.192.000	0	0
17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	20	10	50	1.200.000	0	0
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	20	11,67	58,35	8.630.000	0	0
19	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT	15	28,75	191,67	218.924.000	6.791.500	3,10
20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.	50	50	100	1.470.000	121.000	8,23
21	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,2	3,69	87,86	62.680.000	18.693.000	29,82
22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	77	-	-	5.924.560.000	2.536.734.862	42,82
23	Nilai AKIP UPT	79,5	-	-	5.924.560.000	2.536.734.862	42,82
24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	4	-	-	5.924.560.000	2.536.734.862	42,82
25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,6	-	-	5.924.560.000	2.536.734.862	42,82

Dari tabel di atas diketahui bahwa capaian kinerja sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2025 yang terendah sebesar 40% yaitu pada indikator Jumlah Desa Pangan Aman dengan realisasi anggaran sebesar 0%. Sedangkan capaian kinerja tertinggi sebesar 197,50% pada indikator Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dengan realisasi anggaran sebesar 7,10%.

3.3.3 Realisasi anggaran per Kegiatan

Tabel 83 Realiasi anggaran per Kegiatan per triwulan I 2025

No.	Program / Kegiatan/ Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	AEA. Koordinasi	14	3	21,42	1470000	121000	8,23
2	BAH. Pelayanan Publik Lainnya	184	53	28,80	62680000	16693000	29,82
3	BDC. Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	4095	1374	33,55	1307558000	9142000	0,7
4	BKB. Pemantauan Produk	1	0	0	88338000	40521390	45,87
5	BMB. Komunikasi Publik	19	5	26,31	2530000	929500	36,74
6	CAB. Sarana Bidang Kesehatan						
7	CAN. Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi						
8	PDD. Standarisasi Lembaga	1	0	0	331320000	0	0
9	QCD. Perkara Hukum Badan Usaha	2	1	50	218.924.000	6791500	3,10
10	QDB. Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga						
	01. Sekolah dengan PJAS Aman	4	0	0	4608000	1462500	31,74
	02. Desa Aman	1	0	0	8192000	0	0
	03. Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	1	0	0	1200000	0	0
11	QDC. Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat						
	sarana Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE farmakovigilans				900000	0	0
12	QDG. Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	45	45	100	8630000	00	0
13	QIA. Pengawasan dan Pengendalian Produk						

No.	Program / Kegiatan/ Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	01. Sampel Pangan Olahan	100	18	18	6652000	5089300	76,66
	02. Sampel Sediaan Farmasi	301	23	7,64	2141000	6819902	31,85
14	QIC. Pengawasan dan Pengendalian Lembaga						
	01. Sarana Produksi Obat dan Makana	89	19	21,34	189896000	10326500	5,44
	02. Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	5	1	20			
	03. Sarana Distribusii	277	33	11,91	8465000	0	0
15	RAB. Sarana Bidang Kesehatan	1	0	100	1802000000	0	0
16	EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal	1	0	0	4719743000	2496213472	52,89
TOTAL					8.737.020.000	2.594.110.064	29,69

3.3.4 Efisiensi dan efektivitas atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan input, yang lebih sedikit tetapi menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase input yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

% CAPAIAN OUTPUT

IE = -----

% CAPAIAN INPUT

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

% RENCANA CAPAIAN OUTPUT

SE = -----

% RENCANA CAPAIAN INPUT

100%

SE = ----- = 1

100%

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Efisiensi ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Apabila $IE \geq SE$: kegiatan efisien

Apabila $IE < SE$: kegiatan tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

TE = $\frac{IE - SE}{SE}$

Dalam laporan kinerja ini, pengukuran tingkat efisiensi bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dalam laporan kinerja ini dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara output dan input (berupa dana). Hasil pengukuran Tingkat Efisiensi Sasaran Kegiatan pada Triwulan I tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 84 Tingkat Efisiensi dan efektivitas atas penggunaan sumber daya dalam

No	Indikator Kinerja	% Capaian Indikator	% Capaian anggaran	IE	TE	KATEGORI
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	117,77	31,85	3,70	2,70	Tidak Efisien
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang	-	0	-	-	-

No	Indikator Kinerja	% Capaian Indikator	% Capaian anggaran	IE	TE	KATEGORI
	telah melaporkan KTD/ESO					
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	106,67	76,66	1,39	0,39	Efisien
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	-	5,09	-	-	-
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	113,33	76,66	1,48	0,48	Efisien
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	179,61	5,37	33,45	32,45	Tidak Efisien
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	133,33	5,37	24,83	23,83	Tidak Efisien
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	153,85	5,37	28,65	27,65	Tidak Efisien
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	77,35	5,09	15,20	14,20	Tidak Efisien
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	133,33	5,09	26,19	25,19	Tidak Efisien
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	114,41	0	-	-	-
12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa	133,33	0	-	-	-

No	Indikator Kinerja	% Capaian Indikator	% Capaian anggaran	IE	TE	KATEGORI
	dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan					
13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	197,5	0	-	-	-
14	Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	102,33	0,77	132,90	131,90	Tidak Efisien
15	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	50	31,74	1,58	0,58	Efisien
16	Jumlah Desa Pangan Aman	40	0	-	-	-
17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	50	0	-	-	-
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	58,35	0	-	-	-
19	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT	191,67	3,10	61,83	62,83	Tidak Efisien
20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.	100	8,23	12,15	11,15	Tidak Efisien
21	Indeks Pelayanan Publik UPT	87,86	29,82	2,95	1,95	Tidak Efisien
22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	42,82	-	-	-
23	Nilai AKIP UPT	-	42,82	-	-	-
24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	42,82	-	-	-
25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	42,82	-	-	-

No	Indikator Kinerja	% Capaian Indikator	% Capaian anggaran	IE	TE	KATEGORI
TOTAL		85,63	18,46	4,64	3,64	Tidak Efisien

Pada Triwulan I tahun 2025, hasil pengukuran tingkat efisien berdasarkan indikator sasaran kegiatan sebanyak 25 (dua puluh lima) indikator secara kumulatif masuk kedalam kategori Tidak Efisien (3,64).

BAB 4 PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Balai POM di Bogor Interim Triwulan I Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis pada tahun 2025 mengacu pada Renstra Balai POM di Bogor tahun 2025-2029 yang terdiri dari 10 sasaran strategis dengan 26 indikator kinerja utama. Dari 10 sasaran strategis, diperoleh 1 sasaran strategis memperoleh capaian “**Baik**”, 1 sasaran strategis memperoleh capaian “**Cukup**”, 2 sasaran strategis memperoleh capaian “**Kurang**”, 4 sasaran strategis dengan capaian “**Tidak Dapat Disimpulkan**”, dan 2 sasaran strategis baru dilakukan penilaian di akhir tahun.

Pernyataan pencapaian tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Pada triwulan I tahun 2025 Balai POM di Bogor berhasil Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Bogor dengan NPS sebesar 158,21% dengan kriteria “**Tidak Dapat Disimpulkan**”.
2. Pada triwulan I tahun 2025 Balai POM di Bogor berhasil Meningkatkan Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi di wilayah kerja Balai POM di Bogor dengan NPS sebesar 133,33% dengan kriteria “**Tidak Dapat Disimpulkan**”.
3. Pada triwulan I tahun 2025 Balai POM di Bogor berhasil Mewujudkan Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Bogor dengan NPS sebesar 197,50 % dengan kriteria “**Tidak Dapat Disimpulkan**”.
4. Pada triwulan I tahun 2025 Balai POM di Bogor belum berhasil Meningkatkan Efektivitas KIE di wilayah kerja Balai POM di Bogor dengan NPS sebesar 60,58% dengan kriteria “**Kurang**”
5. Pada triwulan I tahun 2025 Balai POM di Bogor belum berhasil Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu dengan NPS sebesar 58,35% dengan kriteria “**Kurang**”.
6. Pada triwulan I tahun 2025 Balai POM di Bogor berhasil mewujudkan Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Bogor dengan NPS sebesar 191,67% dengan kriteria “**Tidak Dapat Disimpulkan**”.
7. Pada triwulan I tahun 2025 Balai POM di Bogor berhasil mewujudkan Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Bogor dengan NPS sebesar 100% dengan kriteria “**Baik**”.
8. Indikator Kinerja Layanan Publik UPT yang prima baru dilakukan penilaian di akhir tahun.
9. Indikator Kinerja Terwujudnya tata kelola pemerintahan Unit Organisasi yang optimal baru dilakukan penilaian di akhir tahun.

10. Indikator Kinerja Meningkatnya kepuasan masyarakat dan pelaku usaha pengguna layanan atas kinerja penyelenggaraan pelayanan publik BPOM baru dilakukan penilaian di akhir tahun.

Persentase capaian target sasaran strategis Balai POM di Bogor pada triwulan I tahun 2025 antara 58,35% sampai dengan 197,50%. Capaian sasaran strategis terendah pada indikator “Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu”. Sedangkan capaian sasaran strategis tertinggi pada indikator “Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT” sebesar 197,50%.

Pada tahun 2025, anggaran Balai POM di Bogor sebesar Rp.9,854,603,000 (Sembilan Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tiga Rupiah), dengan realisasi sebesar Rp. 1,641,520,442 (Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) sehingga persentase capaian realisasi sebesar 16,66%.

Hasil evaluasi kinerja ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi Balai POM di Bogor untuk dapat memperlihatkan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya

4.2 SARAN

Untuk mengatasi berbagai masalah dan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan, maka Balai POM di Bogor perlu melakukan beberapa pendekatan/perbaikan, antara lain:

1. Koordinasi dengan lintas sektor, sehingga Inpres No. 3 tahun 2018 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan dapat dilaksanakan dengan baik.
2. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait, agar kegiatan yang merupakan tanggungjawab dari pemangku kepentingan didorong untuk dapat dilaksanakan secara mandiri sehingga kerjasama dapat berjalan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.
3. Mengupayakan peningkatan kepuasan masyarakat atau konsumen terhadap layanan publik dengan melakukan berbagai inovasi.
4. Melakukan penyesuaian dalam metode pengawasan pre market, post market dan penyidikan yaitu dengan berbasis teknologi.
5. Melaksanakan area perubahan reformasi birokrasi secara terus menerus dan berkesinambungan.
6. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terkait perencanaan kegiatan, anggaran, keuangan, kepegawaian, kearsipan, sistem mutu, serta melakukan monitoring terkait permasalahan yang terjadi.
7. Mengikuti perkembangan dan pengembangan kompetensi secara rutin melalui webinar dan disesuaikan dengan kebutuhan serta perencanaan pengembangan kompetensi di Balai POM di Bogor.
8. Diperlukan penambahan SDM untuk menunjang tugas dan tanggung jawab jabatan sesuai



dengan beban kerja yang ada.

9. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Criminal Justice System dalam penanganan perkara di bidang obat dan makanan.

LAMPIRAN

1. PK dan RAPK TAHUN 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI BOGOR
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JEFFETA PRADEKO PUTRA
Jabatan : Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bogor

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 12 Februari 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bogor


JEFFETA PRADEKO PUTRA

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan


TARUNA IKRAR

MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
BALAI POM DI BOGOR
TAHUN 2025

	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2024 (menggunakan koma dan tanpa satuan%)	Maret	Realisasi s.d bulan				
					MARET				
					Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1 Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82,50	82,50			95,00	115,15	115,15
		2 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26,00						0,00
		3 Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00	75,00			80,00	106,67	106,67
		4 Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	100,00			0,00	0,00	0,00
		5 Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00	75,00			85,00	113,33	113,33
		6 Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	88,00	20,00			158,06	790,32	179,62
		7 Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00	75,00			100,00	133,33	133,33

	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2024 (menggunakan koma dan tanpa satuan%)	Maret	Realisasi s.d bulan				
					MARET				
					Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
		8 Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	65,00	65,00			100,00	153,85	153,85
		9 Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,50	90,50			70,00	77,35	77,35
		10 Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00	75,00			100,00	133,33	133,33
		11 Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	82,00	82,00			93,82	114,41	114,41
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	1 Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	63,00	15,00			20,00	133,33	31,75
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1 Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	14,00	4,00			7,90	197,50	56,43
		1 Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	83,96	83,96			85,92	102,33	102,33

	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2024 (menggunakan koma dan tanpa satuan%)	Maret	Realisasi s.d bulan				
					Maret				
					Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
4	Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	2 Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	4,00	20,00			10,00	50,00	
		3 Jumlah Desa Pangan Aman	1,00	25,00			10,00	40,00	
		4 Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1,00	20,00			10,00	50,00	
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	1 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	91,00	20,00			11,67	58,33	12,82
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT.	1 Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT	80,00	15,00			28,75	191,67	35,94
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90,00	50,00			50,00	100,00	55,56
8	Layanan Publik UPT yang prima	1 Indeks Pelayanan Publik UPT	4,20				3,69		87,86
		1 Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	77,00						0,00

	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2024 (menggunakan koma dan tanpa satuan%)	Maret	Realisasi s.d bulan				
					Maret				
					Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Unit Organisasi yang optimal	2 Nilai AKIP UPT BPOM	79,50						0,00
		3 Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	4,00						0,00
		4 Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,60						0,00
10	Meningkatnya kepuasan masyarakat dan pelaku usaha pengguna layanan atas kinerja penyelenggaraan pelayanan publik BPOM	1 Indeks Kepuasan Masyarakat	91,50						0,00
11	Meningkatnya kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa	1 Nilai kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa	100,00						0,00
12	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik negara (BMN)	1 Nilai kualitas pengelolaan pengadaan barang milik negara (BMN)	92,37						0,00
13	Meningkatnya pengelolaan kearsipan	1 Nilai Pengelolaan Kearsipan	90,00						0,00

	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2024 (menggunakan koma dan tanpa satuan%)	Maret	Realisasi s.d bulan				
					Maret				
					Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
14	Meningkatnya efektifitas koordinasi dalam program sediaan farmasi dan pangan olahan di Provinsi/Kabupaten/Kota	1 Persentase keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi dan pangan olahan di provinsi/kabupaten/kota	95,00						0,00
15	Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri	1 Persentase realisasi belanja produk dalam negeri	83,00						0,00

Bogor, 16 April 2025
Mengetahui,
Kepala Balai POM di bogor



Jeffeta Pradeko Putra, S.Farm., M.Si.

